



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 71 Volume XVIII / September 2022

20

Penetapan RUKD Faktor
Penting Penetapan RUKN

14

Didukung DPR,
Kementerian ESDM
berikan bantuan bagi
5.487 Rumah Tangga
di Kalimantan Barat

40

Frontliner
Pelayanan Publik
Bawa Nama Baik Instansi

42

Kementerian ESDM
Gandeng ISEI Jawa Barat
Sosialisasikan Program
Infrastruktur Kelistrikan



ISSN 2808-4578



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MAKLUMAT PELAYANAN GATRIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK LEBIH BAIK

NO. NAMA LAYANAN

1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU);
2	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
3	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
5	Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara
6	Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
7	Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara
8	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
9	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
10	Layanan Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
11	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik
12	Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
13	Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan
14	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
15	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah);
16	Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
17	Penetapan Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
18	Penghitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dari Unit Pembangkit Tenaga Listrik
19	Registrasi Sertifikat Kompetensi dan/atau Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
20	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
21	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
22	Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
23	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
24	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)
25	Layanan Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
26	Layanan Pengelolaan Permintaan Informasi Publik (PPID) dan Pengaduan Publik





BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 71 Volume XVIII / September 2022

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Pimpinan Redaksi
Pandu Satria Jati Bonifasius

Redaktur
Anggita Miftah Hairani
Utami Hikmaasih
Agnes Tania
Dina Andriani

Penyunting/Editor
Ernawaty

Desain Grafis
Agus Surahman
Agah Muhammad Abduh

Sekretariat
Arujin
Fiantina Mayasari
Nur Mazidah

Alamat Redaksi
Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan energi berkeadilan melalui pemerataan akses listrik. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk memperoleh akses listrik adalah melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Alokasi APBN tahun 2022 untuk Program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 Provinsi. Sinergi DPR dan Kementerian ESDM terwujud melalui beberapa peresmian Program BPBL yang diawali dengan peresmian di Wajo dan Maros, Sulawesi Selatan hingga peresmian di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ulasan lengkap mengenai Program BPBL sekaligus testimoni masyarakat penerima manfaat menjadi Tajuk Utama pada Buletin Ketenagalistrikan edisi 71 volume XVIII September 2022 ini.

Bahasan selanjutnya adalah Liputan Khusus berupa penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di daerah diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RUKD di provinsi tersebut. Penyusunan RUKD dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang memiliki kewenangan daerah provinsi bidang ketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada di wilayah administrasinya. Sebagaimana kita ketahui, penetapan RUKD merupakan faktor penting dalam penetapan RUKN.

Pada rubrik Warta Kita, beberapa isu diangkat mulai dari kesiapan pasokan listrik untuk KTT G20 di Bali, peluncuran aplikasi AMPERE Gatrik, hingga komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di Ditjen Ketenagalistrikan.

Selamat membaca!

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum, misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

BULETIN

KETENAGALISTRIKAN

Tajuk Utama

- 6** Kementerian ESDM Targetkan 80.000 Rumah Tangga Terima Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun Ini
- 8** Bantuan Pasang Baru Listrik, Kado Kemerdekaan Bagi Sopi'i
- 10** 3.860 Rumah Tangga di Sulawesi Selatan Dapat Instalasi Listrik Gratis
- 12** Menenun Asa dengan Instalasi Listrik Sendiri
- 14** Didukung DPR, Kementerian ESDM berikan bantuan bagi 5.487 Rumah Tangga di Kalimantan Barat

Liputan Khusus

- 16** Potensi EBT Daerah agar Menjadi Acuan dalam Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah di Sulawesi Selatan
- 18** Kementerian ESDM Harapkan Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha dalam Penyusunan RUKN
- 20** Penetapan RUKD Faktor Penting Penetapan RUKN
- 22** Kementerian ESDM: Pemerintah Daerah Agar Segera Susun RUKD

Warta Kita

- | | |
|--|--|
| <p>24 Pemerintah Apresiasi Program REEP2 Untuk Peningkatan EBT</p> <p>26 Dievaluasi Menpan RB, Ditjen Gatrik Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan</p> <p>28 Pemerintah Indonesia Tegaskan Peran Stakeholder dalam Transisi Energi</p> <p>29 Susun Aturan Pajak Karbon, Kementerian ESDM Perlu Masukan Pelaku Usaha</p> <p>30 Pentingnya Budaya Mitigasi Resiko Organisasi</p> <p>31 Pemerintah Apresiasi upaya Efisiensi PLTU Karangandri</p> <p>32 Tingkatkan Motivasi Pegawai, Ditjen Gatrik Gelar Gatrik Award</p> <p>34 Kementerian ESDM: Penyediaan Listrik Harus Perhatikan Keselamatan Ketenagalistrikan</p> <p>36 Smart Grid Jadi Faktor Kunci Capai Net Zero Emission</p> <p>37 Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik KTT G20 Bali</p> <p>38 KESDM Libatkan Stakeholder dalam Pencarian Lokasi Kerja Praktek SMK Bidang Ketenagalistrikan</p> <p>39 Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, Semua Harus Bangkit dari Pandemi</p> <p>40 Frontliner Pelayanan Publik Bawa Nama Baik Instansi</p> <p>42 Kementerian ESDM Gandeng ISEI Jawa Barat Sosialisasikan Program Infrastruktur Kelistrikan</p> | <p>44 Energy Watch Apresiasi pemerintah Tak Naikkan Tarif Listrik Untuk Golongan Subsidi</p> <p>46 Dorong Percepatan KBLBB, Pemerintah Tingkatkan Jumlah SPKLU dan SPBKLU</p> <p>48 Ditjen Gatrik Gelar Forum Bertukar Pengalaman Kerja Antar Unit</p> <p>49 Pemerintah Apresiasi Dukungan MKI untuk Ketenagalistrikan Berkelanjutan</p> <p>50 Pemerintah Dukung Program KBLBB Dalam Tingkatkan Efisiensi dan Konservasi Energi</p> <p>52 Sharing Pengalaman Badan Usaha Sebagai Masukan Penyusunan Regulasi PLTS Atap</p> |
|--|--|

Kolom

- 54** Program Elektrifikasi Seluruh Penjuru Negeri:
Penantian Cahaya Terang Hasil Konsultasi Publik Penyediaan Listrik Pedesaan melalui Model Bisnis Micro IPP dan KSO

Galeri

- 56** Gatrik Award 2022

Daftar Regulasi

- 58** Daftar Regulasi Koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Per Oktober Tahun 2022

KEMENTERIAN ESDM TARGETKAN 80.000 RUMAH TANGGA TERIMA BANTUAN PASANG BARU LISTRIK TAHUN INI



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka acara Forum Diskusi Publik di Bandung, Kamis (10/8/2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam pembukaan Forum Diskusi Publik di Bandung, Kamis (10/8/2022) menyebutkan, program ini bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100%.

“Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN tahun 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia” ucap Ida.





Lebih lanjut Ida menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I 2022 telah mencapai angka 99,56%. Ia menyebutkan program BPBL yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi.

Pemerintah disebut Ida terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100% Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022. Upaya memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T tersebut dilakukan dengan berbagai macam selain program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Pemerintah memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrig, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)," ujar Ida.

Upaya Pemerataan Listrik

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56%, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73% sampai dengan triwulan II 2022.

Wanhar menyebutkan Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100%. Upaya pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Upaya kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok. Upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun

Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.

Program BPBL disebut Wanhar menggenapi tiga strategi yang sudah dijalankan pemerintah tersebut. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.

Wanhar menyebut program BPBL memiliki berbagai manfaat diantaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PT PLN (Persero), masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif. (U)



BANTUAN PASANG BARU LISTRIK, KADO KEMERDEKAAN BAGI SOPI'I

Peringatan Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirasakan berbeda bagi Sopi'i (40), warga Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan pemerintah kota Batu ini mendapatkan bantuan pasang baru listrik dari Pemerintah tepat di peringatan ke-77 Kemerdekaan RI. Sebelumnya, Sopi'i harus berbagi meteran listrik dengan rumah orang tuanya karena keterbatasan biaya penyambungan baru.

"Listrik rumah saya nyalur dari rumah orang tua di sebelah, makanya sering tidak akurat. Mau buat saluran sendiri, uangnya tidak cukup," ungkap Sopi'i yang ditemui di kediamannya Senin (15/07/2022).

Setelah mendapat bantuan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sopi'i resmi jadi

pelanggan listrik PT PLN (Persero). Sopi'i termasuk dalam kategori rumah tangga tidak mampu yang diberikan program bantuan penyambungan listrik baru oleh Pemerintah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah, dihari Kemerdekaan ini saya punya listrik sendiri," ucap Sopi'i.

Bantuan juga diterima oleh Agustinus Rengga (67) warga Desa Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kota Ende Nusa Tenggara Timur. Sehari-hari Agustinus



Sopi'i mendapatkan bantuan pasang baru listrik dari Pemerintah tepat di peringatan ke-77 Kemerdekaan RI (15/07/2022).

bekerja sebagai petani kebun didampingi istrinya yang merupakan seorang penenun kain. Untuk menerangi rumahnya di malam hari, ia berjuang dengan hanya mengandalkan lampu pelita minyak tanah.

“Sebelumnya sempat berbagi saluran listrik dari tetangga, tetapi dua tahun terakhir diputus” ujarnya.

Kini, setelah mendapatkan bantuan program BPBL dari pemerintah, Rengga merasa bersyukur telah memiliki jaringan listriknya sendiri. Ia merasakan kemerdekaan yang sejati.

Upaya Kejar Rasio Elektrifikasi

Seperti diketahui, Kementerian (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga tidak mampu dan tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program BPBL melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam Forum Diskusi Publik di Bandung, Rabu (12/8/2022) mengatakan, program BPBL ini bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100%.

Ida menyebutkan, rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I 2022 telah mencapai angka 99,56%. Ia menyebutkan program BPBL yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi.

“Pemerintah memiliki beberapa strategi seperti perluasan jaringan, pembangunan minigrig, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL),” ujar Ida.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar mengungkapkan, masyarakat penerima manfaat program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.

Wanhar menyebut program BPBL memiliki berbagai manfaat diantaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PT PLN (Persero), masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.

Program BPBL disebut Wanhar sebagai komitmen pemerintah dalam pemerataan akses listrik di Indonesia dan bukti bahwa negara hadir dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi. Seperti yang dirasakan Sopi'i dan Rengga, kemerdekaan harus dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. (U)

3.860 RUMAH TANGGA

DI SULAWESI SELATAN DAPAT

INSTALASI LISTRIK GRATIS



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris meresmikan Program BPBL di Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (9/9).

Sebanyak 3.860 rumah tangga di Sulawesi Selatan akan mendapatkan instalasi listrik gratis di tahun 2022 ini. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) ini merupakan sinergi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPR RI sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Rasio elektrifikasi penting di zaman now untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan juga sumber daya manusia (SDM). Saya berharap ada korelasi positif antara

listrik dan kualitas SDM,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat peresmian Program BPBL di Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (9/9).

Lebih lanjut Andi menyampaikan bahwa untuk tahun 2023, direncanakan ada sebanyak 83.000 penerima manfaat Program BPBL. “Program ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Kalau merasa sudah mampu, berikan pada yang kurang mampu,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menyampaikan, program BPBL secara nasional diperuntukkan bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.

"Kabupaten Maros rencananya akan dipasang sebanyak 643 rumah tangga di tahun 2022 ini di mana beberapa di antaranya terdapat di Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ini," ujarnya. Di samping Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan juga rencananya akan dipasang instalasi listrik gratis untuk 576 rumah tangga.

"Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama," tuntasnya.

Dalam acara ini, turut hadir pula Bupati Maros Chaidir Syam dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Andy Achaminoerdin.



Mandiri dengan Instalasi Listrik Sendiri

Asrul (35), pekerja bengkel dari Maros, menyampaikan rasa terima kasihnya karena ia mendapatkan bantuan pasang baru listrik. Sebelumnya, ia menyalur ke tetangganya.

"Terkadang listriknya tidak kuat dan mati. Dengan (instalasi) listrik milik sendiri, jadi mandiri," katanya.

Bapak tiga anak ini bercerita kalau istrinya bekerja membuat baju berpayet hingga malam. Dengan listrik yang tak lagi menyalur, ia jadi tak perlu khawatir mati lampu pada malam hari karena kelebihan beban

listrik akibat berbagi dengan tetangga.

Asrul merupakan salah satu penerima manfaat BPBL. Kementerian ESDM menugaskan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL Tahun Anggaran 2022. Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat. (AMH/KO)



MENENUN ASA DENGAN INSTALASI LISTRIK SENDIRI

Wajah ramah Nurma (40) menyambut kedatangan Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan di rumah kayu miliknya. Seperti lazimnya rumah tradisional di Sulawesi Selatan, rumah Nurma di Desa Tancung, Wajo, Sulawesi Selatan bertingkat dengan tangga kayu. Pada bagian bawah rumahnya terdapat dua buah alat penenun manual. Tetangga Nurma, seorang ibu berusia lanjut, terlihat sedang menenun kain untuk sarung.



Di antara alat tenun itu, ada bale-bale kayu dengan satu lampu di atasnya. Kami bercakap-cakap di bale-bale dengan sesekali diselingi suara kayu tenun beradu. Nurma sumringah karena dia baru saja menerima instalasi listrik gratis pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Dulu listrik menyalur ke tetangga. Kalau hujan, kabelnya kena pohon pisang dan putus," ujar Nurma sambil menunjuk kebun di belakang rumahnya.

Ia lantas mengajak Tim Ditjen Ketenagalistrikan naik ke rumahnya yang didominasi warna kuning. Nurma berharap dengan instalasi listrik milik sendiri, hal tersebut tak terjadi lagi.

"Lebih enak punya (instalasi) listrik sendiri," ujar ibu dua anak ini tertawa.



Nurma (40) menyambut kedatangan Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan di rumah kayu miliknya, Sabtu (10/9/2022).

Dulu listrik menyalur ke tetangga.
Kalau hujan, kabelnya kena pohon pisang dan putus

Nurma

Program BPBL untuk Pemerataan Akses Listrik

Program BPBL bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui pemerataan akses listrik dan percepatan penyediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan hal tersebut, Sabtu (10/9/2022), dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Tancung, Wajo, Sulawesi Selatan.

"Kementerian ESDM telah merencanakan sebanyak 3.860 rumah tangga calon penerima BPBL untuk Provinsi Sulawesi Selatan, di mana untuk Kabupaten Wajo rencananya akan dipasang sebanyak 576 rumah tangga di tahun 2022 ini," ujar Wanhar.

Menurut Wanhar, kecukupan dan keadilan merupakan hal penting untuk mempermudah akses listrik kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang berada di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Rasio Elektrifikasi mencapai 100% pada tahun 2022, dengan memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T.

"Hingga semester II tahun 2022, Rasio Elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56%. Masih ada 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T," tutur Wanhar.

Program BPBL merupakan sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan Program BPBL menggunakan anggaran APBN.

"Pada Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 27 September 2021, kami menginisiasi Program BPBL atau meteran listrik gratis. Tahun ini program ini untuk sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 Provinsi. Tahun depan lebih banyak lagi," ujar Andi Yuliani Paris.

Dalam acara peresmian ini, turut hadir pula Bupati Wajo Amran Mahmud dan Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Adi Priyanto. (AMH)

DIDUKUNG DPR,

KEMENTERIAN ESDM BERIKAN BANTUAN

BAGI 5.487 RUMAH TANGGA DI KALIMANTAN BARAT



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meresmikan Program BPBL di Desa Limbung Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (24/09/2022)

Sebanyak 5.487 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Barat akan mendapatkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2022 ini. Program yang didukung Komisi VII DPR RI ini menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tinggal di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) dan atau layak berdasarkan validasi kepala Desa/Lurah atau pejabat setingkat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam peresmian Program BPBL di Desa Limbung Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (24/09/2022) menyampaikan, untuk kabupaten Kubu Raya sebanyak 1.134 rumah tangga yang akan menerima manfaat program BPBL di tahun 2022 ini.

"Berkat support dan semangat dari pemerintah, PT PLN (Persero) dan segenap seluruh kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja di lapangan dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat," ujar Maman.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa program ini merupakan terobosan besar dari Komisi VII DPR RI yang mau melihat masalah sampai ke lapangan.

"Selain program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum ada jaringan listriknya," ujar Dadan.

Hingga semester II 2022, Rasio Elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56%. Dari data tersebut Dadan menyebut masih ada sekitar 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T.

Seperti diketahui tahun ini Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia mendapatkan program BPBL dari APBN. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan bahwa PLN mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program BPBL Tahun Anggaran 2022.

Dalam mengeksekusi program tersebut, ia mengatakan PLN telah berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menyiapkan

infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung program tersebut.

"Untuk menjalankan penugasan ini kami telah menyiapkan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program ini," ucapnya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VII DPR RI sehingga aspirasi masyarakat yang belum mendapatkan listrik dapat disampaikan kepada Kementerian ESDM.

Ia juga menegaskan pihaknya siap menyiapkan dan mengawal data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyambungan listrik di daerahnya.

Tak Lagi Ambil Listrik dari Tetangga

Budianto (42) warga Limbung Raya yang merupakan salah satu penerima manfaat BPBL, menyampaikan rasa terima kasihnya karena ia mendapatkan bantuan pasang baru listrik.

Sebelumnya, pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan ini menyalur ke surau di depan rumahnya.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan PLN. Setelah sekian lama, akhirnya dengan adanya bantuan ini rumah saya berlampu," katanya.

Bapak lima anak ini bercerita selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Dengan adanya bantuan BPBL ini tidak perlu lagi menarik kabel dari surau.

Bantuan BPBL juga diberikan kepada Syaiful (46) yang sebelum menerima BPBL menarik jaringan listrik dari tetangganya. Syaiful yang berprofesi musisi ini mengatakan dengan bantuan ini mereka akhirnya bisa lebih leluasa memanfaatkan listrik.

"Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu rakyat yang kurang mampu ini, dengan bantuan ini apa yang kesusahan dan kekurangan bisa terpenuhi," pungkasnya.(AT)



POTENSI EBT DAERAH

AGAR MENJADI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH DI SULAWESI SELATAN

Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan beragam, mulai dari energi air, angin, hingga matahari. Potensi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) di provinsi tersebut. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan penyusunan RUKD dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang memiliki kewenangan daerah provinsi bidang ketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada di wilayah administrasinya.

“RUKD disusun oleh masing-masing provinsi. Kepala daerahlah yang mengetahui potensi energi di daerahnya, dengan dukungan experts dan perguruan tinggi, dan dibantu stakeholder dan PLN,” ujar Wanhar dalam FGD Tata Cara Penyusunan RUKD dan Kebijakan Rendah Karbon, Selasa (26/07/2022). Acara ini yang dilakukan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan secara tatap muka di Makassar.



Wanhar mengatakan kebijakan rendah karbon makin mengglobal dengan perlunya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ia menyampaikan dalam rangka mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat di bawah business-as-usual (BAU) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Di samping itu, ia menyebut komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.

“Kebijakan pemerintah terkait NZE pada tahun 2060 tersebut memerlukan pemutakhiran dokumen RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional-red.) dan RUKD yang telah disusun,” Wanhar menyampaikan.

Sesuai amanat PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun RUKD paling lambat satu tahun sejak RUKN ditetapkan.



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam FGD Tata Cara Penyusunan RUKD dan Kebijakan Rendah Karbon, Selasa (26/07/2022).

"Menurut catatan kami, hingga saat ini baru tujuh Pemerintah Daerah yang telah menetapkan RUKD yaitu Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Kami berharap pemerintah provinsi yang lain seperti Sulawesi Selatan menyusul," tutur Wanhar.

Dalam kesempatan yang sama, Salama Manjang dari Universitas Hasanuddin mengungkapkan perlunya dukungan data potensi sumber daya dalam penyusunan RUKD.

"Apakah ada update data-data terbaru sumber daya terbarukan utamanya terkait data air? Kita sebetulnya kaya akan tenaga air. Kalau data potensinya pakai data lama jadi kurang realistis. Mudah-mudahan ada data yang terbaru. Kita sekarang fokus dengan potensi renewable energy, seperti energi angin di Sidrap dan juga potensi matahari," ujarnya.

Retno Setianingsih dari USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR) mengatakan Sulawesi Selatan sudah menjadi mitra USAID dalam pengembangan energi terbarukan. Di samping itu, Sulawesi Selatan juga telah berkomitmen untuk melakukan perencanaan pembangunan

rendah karbon. Menurutnya, salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan rendah karbon ini adalah harmonisasi dengan perencanaan energi, khususnya terkait penyediaan pasokan untuk mendukung kebijakan rendah karbon ini.

"Kegiatan penyusunan RUKD ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Dinas ESDM Sulawesi Selatan dan stakeholder, karena ini menjadi salah satu kunci untuk harmonisasi dengan perencanaan pembangunan rendah karbon," ujar Retno.

FGD ini merupakan kerja sama antara Dinas ESDM Sulawesi Selatan dan USAID SINAR. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan, akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin, dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UIW Sulselrabar). (AMH)



KEMENTERIAN ESDM

HARAPKAN MASUKAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMEGANG WILAYAH USAHA DALAM PENYUSUNAN RUKN



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar saat membuka FGD RUKN Seri Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Pulau Sulawesi, Rabu (27/7/2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan masukan dari pemerintah daerah dan pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Saat ini Kementerian ESDM tengah membahas pemutakhiran RUKN. Untuk itu peran atau kontribusi, serta usulan dan saran dari seluruh pemerintah daerah dan pemilik wilayah usaha diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan RUKN tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar saat membuka FGD RUKN Seri Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Pulau Sulawesi, Rabu (27/7/2022). Acara ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing

Resilience (SINAR).

Wanhar menyampaikan RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

"RUKN ini dalam penyusunannya harus mengikutsertakan peran atau kontribusi, serta usulan dan saran dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia," ujar Wanhar.

Ia lantas menjelaskan bahwa sesuai regulasi, RUKN dapat dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun. Wanhar menyebut ada beberapa kondisi yang dapat menjadi penyebab pemutakhiran RUKN, di antaranya adalah adanya perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi, adanya perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target, adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan, serta kondisi lainnya yang ditentukan oleh

Pemerintah Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Wanhar juga mengungkapkan keharusan pemegang wilayah usaha (wilus) untuk memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Menurutnya, saat ini terdapat tiga pemegang wilus di Pulau Sulawesi selain PT PLN (Persero), yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Karampuang Multi Daya (KMD), dan PT Sultra Energi Indonesia (SEI). Dari ketiga pemegang wilus tersebut, hanya PT IMIP yang memiliki RUPTL yang sudah disahkan.

“Dua pemegang wilus lainnya yaitu PT KMD dan PT SEI harus segera menyusun RUPTL sebagai dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,” Wanhar menegaskan.

Perencanaan Kelistrikan Berbasis EBT

Transisi energi yang makin menuju energi baru terbarukan (EBT) juga mempengaruhi perencanaan pada subsektor ketenagalistrikan. Wanhar mengatakan salah satu penyesuaian kebijakan penyediaan tenaga listrik nasional yang dilakukan antara lain pembatasan penambahan PLTU batu bara.



“Kita bertransisi dari energi fosil ke EBT. Potensi-potensi yang ada di daerah seperti di Pulau Sulawesi perlu kita gali. Ini bisa jadi strategi kita dalam mencapai target Net Zero Emission serta memenuhi kebutuhan listrik secara nasional,” ujarnya.

Senada, Mark Newton dari USAID mengungkapkan pentingnya kebijakan rendah karbon. Ia menyampaikan USAID SINAR menerapkan program bantuan teknis dalam bentuk FGD, consultation meeting, dan workshop untuk mendukung Kementerian ESDM dalam mewujudkan capaiannya. Menurut Mark, USAID SINAR berkomitmen membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan transisi menuju energi yang andal dan berkelanjutan.

“Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah penyusunan RUKN yang mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan provinsi khususnya dalam hal proyeksi kebutuhan listrik serta optimalisasi jangka panjang penyediaan listrik yang telah mengadopsi skenario pembangunan rendah karbon,” tuturnya.

FGD ini dilakukan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan secara tatap muka di Makassar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, pemerintah daerah di Sulawesi, pemegang wilus di Sulawesi, dan USAID SINAR. FGD ini direncanakan dilakukan sebanyak lima kali pada setiap pulau besar di Indonesia yang diawali dengan pelaksanaan FGD di Sulawesi. (AMH)

PENETAPAN RUKD FAKTOR PENTING PENETAPAN RUKN

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Langkah ini penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).



Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Pramudya memberikan paparan pada Focus Group Discussion (FGD) RUKN Seri Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara secara hybrid, Rabu (31/7/2022).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Pramudya pada Focus Group Discussion (FGD) RUKN Seri Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara secara hybrid, Rabu (31/7/2022). FGD ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR).

"Masukan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui RUKD sangat penting karena daerah lebih paham kondisi kebutuhan tenaga listrik dan potensi apa yang ada di daerah untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik," ujar Pram.

Seperti diketahui, salah satu kewenangan Pemda provinsi di bidang ketenagalistrikan adalah penetapan RUKD. Pram menjelaskan hingga saat ini baru 7 Pemerintah Daerah yang telah menetapkan RUKD yaitu Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan RUKD dan kami berharap Pemerintah Daerah lainnya segera mempersiapkan diri menyusun RUKD sehingga target penetapan RUKD satu tahun setelah RUKN ditetapkan dapat tercapai," pungkas Pram.

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini Indonesia dan dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini berdampak pada berbagai sektor termasuk ketenagalistrikan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan signifikan antara realisasi usaha penyediaan tenaga listrik dengan proyeksi yang ditetapkan Pemerintah dalam RUKN 2019-2038.

Pram mengatakan sejak tahun 2021, dalam rangka COP 26, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) saling berkoordinasi dalam membahas skenario Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat. Diskusi tersebut terus berlanjut terutama terkait target emisi pada pembangkit tenaga listrik, di mana Kementerian LHK menargetkan emisi sekitar -66 juta ton pada tahun 2060 sementara Kementerian ESDM menargetkan zero emission.

Dalam rangka mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat di bawah business-as-usual (BAU) dan 41% bersyarat dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.

“Realisasi kontribusi batu bara dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik telah melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam RUKN 2019–2038. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian kebijakan penyediaan tenaga listrik nasional antara lain pembatasan penambahan PLTU batu bara yang berdampak pada perlunya penambahan interkoneksi antar sistem dalam pulau bahkan antar pulau,” ujar Pram.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM dan Permen ESDM 8/2021 tentang Tata Cara Penyusunan RUKN dan RUKD, RUKN dapat dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2021, dalam rangka pengumpulan data dan metodologi untuk pemutakhiran RUKN, Pemerintah telah mengundang dan menampung masukan dari stakeholder yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemda, badan usaha pemegang wilayah usaha (wilus) dan akademisi.

Dengan telah selesainya penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dan optimasi suplai untuk RUKN, Ditjen Gatrik akan mengadakan rangkaian FGD sebanyak 5 (lima) kali untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder. FGD bersama Pemda dan badan usaha pemegang wilus akan dilakukan pada setiap pulau besar di Indonesia.

“Untuk kali ini, kami akan mengumpulkan masukan dari Pemda dan badan usaha pemegang wilus di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara terkait rancangan RUKN yang telah kami susun,” kata Pramudya.

Pemegang Wilayah Usaha Wajib Miliki RUPTL

Sesuai dengan Pasal 21 Permen ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang wilus wajib memiliki RUPTL. Pemegang wilus wajib menyampaikan hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik dan laporan realisasi RUPTL secara berkala kepada Menteri.

Saat ini, terdapat 4 pemegang wilus di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara selain PT PLN (Persero), yaitu PT Mikro Kisi Sumba, PT Weda Bay Energi, PT Puncakjaya Power, dan PT Biogreen Power Jayapura.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Kebijakan, Perencanaan dan Tata Kelola Energi di Proyek SINAR Asclepias Rachmi Soerjono mengatakan selain proses dialog untuk masukan RUKN, SINAR memberikan pendampingan teknis untuk mendukung pemerintah provinsi dalam menyelaraskan berbagai perencanaan bidang energi, menyusun tahapan rencana aksi dan implementasinya, serta dalam proses pemantauan, evaluasi dan pelaporannya.

“Kami berharap agar rangkaian ini dapat memperkuat dukungan SINAR kepada DJK sebagai salah satu mitra dalam mengembangkan perencanaan energi dalam rangka mengupayakan ketahanan energi di Indonesia,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, pemerintah daerah dan pemegang wilus di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dan USAID SINAR. (AT)

“

Masukan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui RUKD sangat penting karena daerah lebih paham kondisi kebutuhan tenaga listrik dan potensi apa yang ada di daerah untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Pramudya

”

KEMENTERIAN ESDM:

PEMERINTAH DAERAH AGAR SEGERA SUSUN RUKD

Dalam melakukan pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Hal tersebut menjadi penting karena akan menjadi pedoman pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Pramudya pada Focus Group Discussion (FGD) RUKN Seri "Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Jawa-Bali" yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR) di Surabaya, Kamis (08/09/2022).

"Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan RUKD, dan kami berharap Pemerintah Daerah lainnya segera mempersiapkan diri menyusun RUKD, sehingga target penetapan RUKD satu tahun setelah RUKN ditetapkan dapat tercapai," ujar Pram mewakili Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan.



Lebih lanjut Pram menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun RUKD paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUKN ditetapkan.

"Menurut catatan kami, hingga saat ini baru 7 Pemerintah Daerah yang telah menetapkan RUKD yaitu Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah," ungkap Pram.

Untuk memudahkan penyusunan RUKD, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan RUKN dan RUKD yang merupakan penyesuaian dari Permen ESDM No 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) RUKN Seri "Masukan Pemerintah Daerah dan Pemegang Wilayah Usaha di Jawa-Bali" yang dilaksanakan di Surabaya, Kamis (08/09/2022).

Masukan Stakeholder Untuk RUKN

Pada tahun 2021, dalam rangka pengumpulan data dan metodologi untuk pemutakhiran RUKN, Pemerintah telah mengundang dan menampung masukan dari stakeholder yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha pemegang wilayah usaha (wilus) dan akademisi.

Dengan telah selesainya penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dan optimasi suplai untuk RUKN, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan rangkaian FGD sebanyak 5 (lima) kali di beberapa daerah untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder.

"Kami akan mengumpulkan masukan dari Pemerintah Daerah dan badan usaha pemegang wilus di Jawa-Bali. Masukan dari stakeholder sangat penting karena RUKN akan menjadi pedoman penyusunan RUKD dan RUPTL, yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum," ujar Pram.

Senada dengan hal tersebut, Director of Advance Energy System USAID SINAR Hanny J. Berchmans mengungkapkan bahwa diskusi dan masukan bersama semua pihak sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan. Ia menyampaikan USAID SINAR menerapkan program bantuan teknis dalam bentuk FGD, consultation meeting, dan workshop untuk mendukung Kementerian ESDM dalam mewujudkan capaiannya.



"USAID SINAR berkomitmen membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan transisi menuju energi yang andal dan berkelanjutan," ungkap Berchmans.

FGD ini dilakukan hybrid secara tatap muka di Surabaya serta secara online melalui Zoom Meeting. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, pemerintah daerah di Jawa-Bali, pemegang wilus di Jawa-Bali, dan USAID SINAR. Sebelumnya telah dilakukan rangkaian FGD di Makassar pada tanggal 27 Juli 2022, Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2022, dan Kupang pada tanggal 31 Agustus 2022. (U)



PEMERINTAH APRESIASI PROGRAM REEP2 UNTUK PENINGKATAN EBT

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengapresiasi Program Energi Terbarukan untuk Ketenagalistrikan 1.000 Pulau Tahap 2 (REEP2) dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Wanhar pada acara Webinar Hosting Capacity EBT Intermitten pada Jaringan Distribusi, Rabu (28/09/2022).

Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui Deutsche Gesellschaft Zusammenarbeit (GIZ) memiliki program kerjasama yang dicanangkan pada tahun 2019 bernama REEP 1000 Kepulauan (Project 1000 Island – Renewable Energy for Electrification Programme) dan dilanjutkan oleh REEP2 sejak tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan, regulasi, dan kondisi teknis di tingkat nasional dan daerah dalam mencapai target 23% sumber energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) sebagai mitra proyek.

“Kita semua berkumpul di sini karena kita percaya bahwa masa depan



“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Tim Deutsche Gesellschaft Zusammenarbeit (GIZ) melalui Program REEP2 atas dukungan berkelanjutan kepada Indonesia dalam beberapa program, terutama dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia,” ujar Wanhar.

pengembangan energi berkomitmen untuk mendukung energi bersih dan dekarbonisasi yang telah dinyatakan dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi kenaikan suhu global tidak melebihi 2oC dan berusaha untuk di bawah 1,5oC,” jelas Wanhar.



Pemerintah Indonesia telah menempatkan komitmen ini dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement kepada UNFCCC, dan menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat di bawah bisnis seperti biasa (BAU) dan bersyarat 41% dengan dukungan

“Salah satu tantangan dalam penerapan dan percepatan energi terbarukan di Indonesia adalah pandangan bahwa Energi Terbarukan intermiten akan mengganggu stabilitas sistem tenaga listrik sementara pada saat yang sama, kapasitas hosting Energi Terbarukan intermiten di grid masih menjadi perdebatan, kata Wanhar.



Direktur Pembinaan Program Wanhar pada acara Webinar Hosting Capacity EBT Intermiten pada Jaringan Distribusi, Rabu (28/09/2022).

Ia menyebutkan bahwa peningkatan pemanfaatan EBT harus diselaraskan dengan stabilitas dan keandalan sistem. Kapasitas Energi Terbarukan hosting yang tepat harus ditangani untuk mengurangi potensi risiko gangguan pada sistem.

Dalam webinar hari ini juga membahas topik mengenai kapasitas hosting energi terbarukan intermiten di jaringan distribusi. Wanhar berharap kegiatan ini dapat memberi pencerahan tentang cara menangani kapasitas hosting EBT, termasuk karakteristik, dampak, dan mitigasi risiko penetrasi energi terbarukan di jaringan distribusi.

internasional yang memadai pada tahun 2030.

Beberapa strategi telah dirumuskan untuk menyediakan akses energi universal dan sektor energi dapat mengurangi emisi GRK sebesar 314 – 446 juta ton CO₂ pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

“Saya yakin GIZ dan seluruh pemangku kepentingan energi dari Indonesia memiliki visi yang sama untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pembangunan energi bersih,” tutup Wanhar. (AT)

Saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan target nasional untuk mencapai 23% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dan menunjukkan kesiapan untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Namun, hingga saat ini, kontribusi energi terbarukan energi di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan masih perlu ditingkatkan secara pesat. Meski demikian, pemerintah tetap fokus memanfaatkan energi terbarukan semaksimal mungkin.



DIEVALUASI MENPAN RB, DITJEN GATRIK KOMITMEN TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) berkomitmen dalam pemenuhan aspek-aspek yang dipersyaratkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pelayanan publik. Evaluasi atas Lokus Perizinan dan Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan dari Menpan RB dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022 menjadi pemicu Ditjen Gatrik dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Pandu Satria Jati dalam acara Focus Group Discussion (FGD) PEKPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, Selasa (20/09/2022). Hadir pula menyampaikan pengantar Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM Enang Sutisna.

Menurut Pandu, Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen memenuhi enam aspek yang dipersyaratkan dalam PEKPPP. Enam aspek tersebut meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik, kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan berupa alokasi anggaran, sarana dan prasarana, hingga dukungan pengembangan kapasitas pegawai untuk memastikan keberlanjutan inovasi,” ujar Pandu.

Lebih lanjut Pandu menyampaikan bahwa sesuai undang-undang Cipta Kerja, perizinan ketenagalistrikan saat ini terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dan dapat diakses di perizinan online Kementerian ESDM pada laman perizinan.esdm.go.id.

“Perizinan ketenagalistrikan sendiri terbagi menjadi izin penyediaan dan izin usaha penunjang tenaga listrik. Di mana izin penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi dua yakni Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS),” jelas Pandu.

Ia juga menyampaikan pengelolaan pengaduan konsumen listrik didasarkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan dilindungi oleh Undang-Undang. Konsumen listrik yang merasa haknya tidak terpenuhi dapat menyampaikan pengaduan kepada Ditjen Ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai beberapa kanal yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengaduan pelayanan publik diantaranya pengaduan tatap muka di ruang pelayanan publik ketenagalistrikan, pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR.

“Kami juga mempunyai Contact Center Kementerian ESDM di 136 yang terintegrasi dengan Contact Center PLN 123, email resmi Ditjen Ketenagalistrikan, pengelolaan pengaduan melalui media sosial, serta kanal khusus seperti aplikasi mobile PEDULI,” jelas Pandu.



Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Pandu Satria Jati dalam acara Focus Group Discussion (FGD) PEKPPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, Selasa (20/09/2022).



Pengukuran untuk Perbaikan Layanan

Dalam mengukur pelayanan publik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara rutin melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per triwulan yang hasilnya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target IKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun ini adalah 3,57. “Pada triwulan II tahun 2022, IKM kami mencapai 3,55. Kami berharap nilai IKM ini akan semakin meningkat seiring dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan kami,” kata Pandu.

Dalam kesempatan yang sama Analis Kebijakan Madya Mulyanah sebagai ketua tim evaluator menjelaskan agar SKM mengacu kepada PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan laporan yang memuat rencana tindak lanjut perbaikan pada setiap unsurnya.

“Sebaiknya kemanfaatan SKM ini justru sebagai bahan evaluasi, dari situ kita berkaca untuk perbaikan dan meningkatkan setiap unsurnya, untuk melakukan perbaikan dan evaluasi, jadi bukan hanya nilai indeks yang ingin dicapai,” ungkap Mulyanah.

Mulyanah juga menyampaikan untuk standar pelayanan agar melibatkan perwakilan dari masing-masing Badan Usaha sehingga memiliki firm standar layanan dan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani para stakeholder.

“Kita identifikasi dulu apa yang dibutuhkan, minta dibuat satu keputusan untuk seluruh standar pelayanan, dan untuk maklumat pelayanan sebaiknya diedarkan di media sosial juga,” jelas Mulyanah.

PEKPPP merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Dalam FGD ini dihasilkan berita acara rekomendasi perbaikan pelayanan publik Ditjen Ketenagalistrikan.

“Kami berharap melalui FGD PEKPPP ini kami mendapatkan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” tutup Pandu. (AT)

Dalam upaya memenuhi komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, pemerintah menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, kolaborasi dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana pada acara Asean Energy Business Forum 2022 "Indonesia's Energy Project Investment Opportunities" yang diselenggarakan secara online pada Jumat, 16 September 2022.

"Dalam mencapai tujuan NZE, kendala yang dihadapi diantaranya adalah infrastruktur di beberapa daerah masih belum terkoneksi dengan jaringan listrik, dan terkadang supply dan demand tidak dalam lokasi yang sama. Untuk itu kolaborasi dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat transisi energi," ungkap Dadan.

Transisi energi menuju energi yang lebih bersih menjadi isu yang sangat penting mengingat kondisi iklim global saat ini. Sebagai salah satu pihak yang turut berkomitmen dalam Paris Agreement, dalam bidang energi Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 314–446 juta ton CO₂ pada tahun 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

"Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia turut serta berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, dan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi 29–41% pada tahun 2030," jelas Dadan.

Komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim tersebut diperkuat dengan

PEMERINTAH INDONESIA TEGASKAN PERAN STAKEHOLDER DALAM TRANSISI ENERGI



Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana pada acara Asean Energy Business Forum 2022 "Indonesia's Energy Project Investment Opportunities" Jumat (16/09/2022).

perumusan sejumlah kebijakan energi. Indonesia telah menetapkan beberapa target penurunan emisi dan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Diantaranya adalah dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, Kementerian ESDM akan menerbitkan sejumlah peraturan, antara lain undang-undang tentang Energi Baru Terbarukan (EBT), melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), memperluas co-firing di PLTU, dan mengubah pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas dan pembangkit listrik EBT.

Untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik pascapandemi, Dadan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan memprioritaskan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dengan basis EBT seperti target yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) "hijau" PT PLN tahun 2021–2030. Pembangkit listrik tambahan setelah tahun 2030 hanya akan berasal dari energi baru dan terbarukan. Mulai tahun 2035 akan didominasi oleh Variable Renewable Energy (VRE) berupa

pembangkit listrik tenaga surya, disusul dengan pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga tidal (pasang surut air laut) pada tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan realisasi investasi EBT di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

"Indonesia memiliki serangkaian insentif, baik fiskal maupun non fiskal terkait tax allowance, fasilitas impor, dan tax holiday. Misalnya panas bumi, kami memiliki beberapa insentif untuk mendukung panas bumi, kami memiliki mekanisme untuk mengisi gap kesenjangan harga tersebut," tutup Dadan.

Asean Energy Business Forum 2022 dengan tema "Indonesia's Energy Project Investment Opportunities" merupakan sarana diskusi yang diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy. Forum ini merupakan rangkaian kegiatan 40th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) yang diselenggarakan secara hybrid dari Kamboja. (U)

Susun Aturan Pajak Karbon, KEMENTERIAN ESDM PERLU MASUKAN PELAKU USAHA

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkitan Tenaga Listrik. Masukan dari para pelaku usaha dianggap sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan untuk penyempurnaan saat implemmentasi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Konsultasi Publik Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Pembangkit Tenaga Listrik, Jumat (15/07/2022) di Tangerang Selatan.



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Konsultasi Publik Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Pembangkit Tenaga Listrik, Jumat (15/07/2022)

“Untuk penyempurnaan dalam pengaturan dan implementasi dari Peraturan tersebut, maka kami memerlukan masukan dan tanggapan dari pelaku usaha”, ujar Nugroho.

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan bahwa untuk komitmen pengurangan emisi GRK dalam jangka panjang, pada tahun 2021 Pemerintah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (Long-Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience/LTS-LCCR) di tahun 2050 dan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya mengatur mengenai penerapan pajak karbon. Berdasarkan peta jalan penerapan pajak karbon, mekanisme pajak akan diberlakukan berdasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di tahun 2022–2024. Pada tahun 2025, implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon akan diterapkan dengan

bertahap sesuai kesiapan sektor terkait dengan memperhatikan antara lain kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan/atau skala.

“Ini merupakan janji presiden sebagai ketua G20 agar penerapan pajak karbon dapat diberlakukan dan dapat sesuai dengan peta jalan pajak karbon, yaitu implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon akan diterapkan pada tahun 2025,” ungkap Bayu.

Dengan adanya amanat dari Peraturan Presiden dan Undang-Undang, maka pada sub sektor pembangkit listrik khususnya PLTU batubara akan diterapkan mekanisme cap and trade and tax. Untuk itu dalam rangka mendukung penerapan tersebut, saat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkitan Tenaga Listrik telah memasuki tahap final.

“Tentunya komitmen pemerintah tersebut tidak akan terpenuhi jika tidak didukung adanya peran dari non-party stakeholder, dalam hal ini terutama adalah pelaku usaha,” tutup Nugroho. (U)

Pentingnya BUDAYA MITIGASI RISIKO ORGANISASI



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari mem buka acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan (Ngopi @perpusgatrik) "Sharing Session Manajemen Risiko Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan", di Jakarta, Selasa (19/07/2022).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyadari bahwa budaya mitigasi risiko di lingkungan organisasi merupakan hal penting. Untuk itu budaya mitigasi risiko perlu dikomunikasikan ke seluruh pegawai agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan baik sesuai peraturan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat membuka acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan (Ngopi @perpusgatrik) "Sharing Session Manajemen Risiko Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan", di Jakarta, Selasa (19/07/2022).

"Salah satu rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terhadap Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan adalah agar Budaya Sadar Risiko terkomunikasikan dengan baik sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai," ungkap Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa acara ini bertujuan memberikan informasi terkait manajemen risiko organisasi bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sekaligus mensosialisasikan Risk Register dan pemetaan risiko yang telah disusun di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Sharing Session ini diadakan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038.K/07/MEM/2018 tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM. Acara ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang tertuang dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-448/PW.02/IJN.I/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Reviu Sistem Pengendalian Intern pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Chaerul D. Djakman sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa risk management itu sudah harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

"Satu kuncinya adalah budaya manajemen risiko sudah harus ada dalam diri kita dan harus inherent dalam mengimplementasikannya. Jadi segala yang kita lakukan itu harus diperhatikan segala risikonya, kalau sudah ada SOP yang baik maka kita harus mengikuti policy tersebut" ujar Chaerul.

Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Muji Hartoto sebagai narasumber kedua menyampaikan bahwa identifikasi risiko melalui risk register tidak berarti mengungkapkan kelemahan organisasi.

"Ketika kita melakukan identifikasi risiko dengan melakukan risk register, adalah bukan berarti mengungkapkan kelemahan kita. Risk register yang sudah dibuat juga seharusnya dilakukan review secara berkala," ujar Muji.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok Kerja Rencana dan Laporan Nur Hidayanto (Alumni CRMO Ditjen Ketenagalistrikan) menyatakan bahwa diharapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kinerja yang lebih baik dengan memetakan risiko yang strategis dan operasional.

"Kita bangun kinerja yang lebih baik, punya semacam early warning dengan memetakan risiko-risiko strategis dan juga operasional," ungkap Nur.

Ida mengatakan, Inspektorat Jenderal KESDM telah memberikan rekomendasi lainnya kepada Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu agar membangun Sistem Monitoring dan Kepatuhan manajemen risiko terintegrasi.

"Hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan maupun pengendalian risiko, serta sebagai alat bantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Karena pentingnya manajemen risiko ini, pengelolaan Risk Register perlu dijadikan sebagai habit pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan," tutup Ida. (U)

PEMERINTAH APRESIASI UPAYA EFISIENSI PLTU KARANGKANDRI

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengapresiasi upaya-upaya efisiensi yang dilakukan PLTU Karangandri. Menurutnya selalu ada ruang untuk efisiensi sehingga bisa menekan biaya operasi. Hal tersebut disampaikan pada Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PLTU Karangandri Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Senin (11/07/2022).

Rida mengatakan salah satu yang harus dibudidayakan adalah digitalisasi pembangkit dan upaya dekarbonisasi. Digitalisasi dalam pembangkitan dapat menekan biaya, terlebih PLTU Karangandri Cilacap merupakan pembangkit yang besar dengan empat unitnya. Selain itu, upaya dekarbonisasi PLTU Karangandri juga diapresiasi sebagai upaya membantu dunia dalam menekan emisi Co2.

"Secara umum PLTU (adalah) penghasil emisi Co2, teman-teman PT Sumber Segara Primadaya (PT S2P) sudah sangat berupaya menekan upayanya, mulai dari 3 unit growing, dari Subcritical Boiler sampai Ultra Supercritical Boiler, penanganan emisi Co2 sudah sangat andal," ujar Rida.

Rida mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menyediakan pasokan tenaga listrik dengan kualitas yang baik, pasokan cukup, dan harga yang terjangkau. Selain itu penyediaan tenaga listrik juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.

"Untuk itu, kami mendorong pengembangan PLTU yang ramah lingkungan melalui berbagai upaya, antara lain penerapan Clean Coal



Technology (CCT) dan pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PLTU," ungkap Rida.

Dalam kesempatan itu Ia mengapresiasi PT PLN (Persero) dan PT S2P yang mampu menjaga pasokan listrik dan pasokan batubara. Ia berharap PT S2P terus menjalankan program pemerintah termasuk di dalamnya menyiapkan pasokan listrik yang andal dan kompetitif.

PLTU Karangandri

PLTU Karangandri adalah pembangkit listrik tenaga uap teknologi Subcritical Boiler yang dibangun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembangkit listrik ini dibangun sejak 29 Desember 2003 dengan beberapa unit yaitu Unit I, II (600 MW), Unit III (660 MW) dan Unit Expansi (1000 MW).

Secara kepemilikan, PLTU Karangandri merupakan perusahaan pembangkit listrik yang dimiliki swasta yaitu PT S2P yang merupakan patungan dari PT Pembangkit Listrik Jawa Bali (anak perusahaan PLN) dengan saham 49% dan PT Sumberenergi Sakti Prima dengan saham sebesar 51%.

PLTU ini memasok ke jaringan 500 kV Jawa-Bali melalui Gardu Induk Tegangan

Ekstra Tinggi (GITET) Adipala dan diteruskan ke GITET Kesugihan.

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto WS dalam kesempatan yang sama mengatakan peranan PLTU Karangandri sangat penting dalam penyediaan energi listrik di Jawa dan Bali. PLTU ini disebutkan dapat mengcover beban besar di Cilacap sehingga keberadaannya sangat strategis termasuk sistem Jawa Madura dan Bali.

"Keberadaan PLTU ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyeimbang kami pada saat beban rendah, kami sangat terbantu akan keberadaan PLTU ini," kata Haryanto.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwanto mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka memastikan tata kelola di PT S2P berjalan dengan baik.

"PLTU Karangandri dalam hal ini sangat strategis posisinya. Pltu memastikan tata kelola dengan baik, dan memiliki sistem kelistrikan yang andal", kata Sugeng.

Kunjungan kerja ini dihadiri pula Wakil Bupati Cilacap, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Direksi PT S2P. (AT)



TINGKATKAN MOTIVASI PEGAWAI, DITJEN GATRIK GELAR GATRIK AWARD

Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen memberikan penghargaan kepada para pegawai dan unit kerja dengan kinerja terbaik melalui Gatrik Award. Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menyampaikan, pemberian penghargaan penting dilakukan untuk memotivasi meningkatkan pencapaian target kinerja. Hal tersebut ia sampaikan pada Malam Penganugerahan Gatrik Award 2022, Jumat (09/09/2022).

"Penghargaan Gatrik Award ini penting karena bisa mendorong pegawai untuk menjadi yang terbaik," ujar Dadan.

Dalam sambutannya Dadan juga mengatakan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan organisasi yang well establish, pelayanan yang diberikan sudah banyak, dan terdapat aturan

"Kita harus mencari supaya pelayanan jadi semakin baik mengarah kepada pemanfaatan energi ujungnya target besar Nationally Determined Contribution (NDC) bisa tercapai," kata Dadan.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menjelaskan pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

"Selain itu dapat mempertahankan PNS yang berkinerja tinggi serta memberikan rasa keadilan bagi PNS yang berprestasi dan berkinerja tinggi, dan meningkatkan kerjasama tim dalam unit kerja untuk mencapai target kinerja," jelas Ida.

Penghargaan Gatrik Award ini dibedakan menjadi empat kategori diantaranya, Pegawai Teladan, Pegawai Berprestasi, Unit Pelayanan Publik Terbaik, serta Unit Kerja Terbaik.

Penganugerahan pegawai berprestasi diberikan kepada masing-masing satu pegawai mewakili unit eselon II yang memenuhi kriteria kedisiplinan, penilaian SKP, capaian hasil assessment kompetensi manajerial ASN minimal dalam kategori optimal serta memenuhi kriteria core values ASN sebagai pegawai berprestasi.

Status pegawai berprestasi tahun ini diberikan kepada: Dina Andriani, S.Hum – Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Fadolly Ardin, S.T., M.T. – Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Syariffuddin Achmad, S.E. – Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, dan R. Andika Bayu Kurniawan, S.T., MBA – Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Selain penghargaan pegawai berprestasi dilakukan juga penghargaan terhadap pegawai teladan, dimana pada tahun ini status pegawai teladan diberikan kepada Nur Hidayanto, S.T., M.T. – Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Pramudya, S.T., M.T. – Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Gigih Udi Atmo, S.T., M.EPM., Ph.D. – Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, dan Didit Waskito, S.T., M.T. – Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Selanjutnya diberikan juga Penghargaan terhadap Unit Pelayanan Terbaik kepada Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan), Unit Kerja Terbaik kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta penghargaan khusus kepada Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan atas prestasinya membawa Ditjen Ketenagalistrikan meraih 15 besar Unit Pelayanan Publik terbaik pada Kompetisi Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2022.

Pada acara ini dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Risk Register, serta Komitmen Bersama Pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan pembacaan Deklarasi Core Values ASN "BerAKHLAK" oleh perwakilan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pada akhir acara diberikan apresiasi terhadap Sekretaris Jenderal KESDM Rida Mulyana yang telah mengabdikan diri selama tiga setengah tahun sebagai Dirjen Ketenagalistrikan. Mewakili seluruh pegawai, para pejabat tinggi memberikan kenang-kenangan kepada Rida Mulyana. Terima kasih atas kepemimpinan dan keteladanan sebagai Dirjen Ketenagalistrikan Pak Rida! (AT).



Ditjen Ketenagalistrikan memberikan penghargaan kepada para pegawai dan unit kerja dengan kinerja terbaik melalui Gatrik Award 2022, Jumat (09/09/2022).



KEMENTERIAN ESDM: PENYEDIAAN LISTRIK HARUS PERHATIKAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyediaan tenaga listrik harus memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan tersebut bertujuan untuk memenuhi kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penilaian administrasi penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) ke PLTU Paiton Unit 1, 2 dan 9 PT PJB UP Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (04/09/22).

“Unsur pembangkitan yang andal dan aman bagi instalasi, zero accident, dan aman dari bahaya bagi manusia, ini menjadi concern bagi kita,” ungkap Ida.



Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi beberapa aspek, yang pertama keselamatan instalasi yaitu memastikan kelaikan operasi melalui sertifikasi bagi unit, peralatan produksi, dana alat angkat serta alat angkut. Kedua mengenai keselamatan kerja yaitu implementasi K3 yang menjadi komitmen manajemen dilakukan dengan penguatan infrastruktur, sistem, budaya, dan kompetensi pelaksana.



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penilaian administrasi penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) ke PLTU Paiton Unit 1, 2 dan 9 PT PJB UP Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (04/09/22).

"Keselamatan Utama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum melalui manajemen pengamanan dan CSR. Dan yang terakhir mengenai keselamatan lingkungan yaitu komitmen dalam pengelolaan lingkungan produksi maupun lingkungan alam sekitar," ujar Ida menjelaskan.

Hadir dalam kunjungan tersebut General Manager PT PJB UP Paiton Agus Prasetyo beserta jajaran manajemen. Agus memaparkan mengenai berbagai upaya dan juga inovasi PLTU Paiton dalam menjaga keselamatan ketenagalistrikan.

"Kami sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan mengenai sertifikasi kompetensi karyawan di operasi dan juga pemeliharaan, dan pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) sudah 100%," ungkap Agus.

sektor ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia. Dalam bidang ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Penilaian Penghargaan Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan yang diharapkan dapat meningkatkan safety culture pada sektor ketenagalistrikan sehingga menciptakan ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan penghargaan tersebut akan masuk dalam salah satu bidang Penghargaan Subroto dalam rangkaian Hari Jadi Pertambangan dan Energi. Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan ini ditujukan kepada pemilik atau pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap (PLTG/GU)



dengan kualifikasi dan klasifikasinya sesuai grid code yang telah ditentukan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyampaikan surat keikutsertaan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan kepada pemilik/ pengelola pembangkit dengan batas waktu pengajuan keikutsertaan pada tanggal 13 Juni 2022.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Didit Waskito mengatakan, kriteria penilaian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan harus memenuhi kualifikasi yang didalamnya memuat pembangkit memiliki Sertifikat Laik Operasi, memiliki IUPTL dan/atau SBU & IUJPTL, unit pembangkit tidak mendapatkan proper lingkungan hidup kategori hitam, serta tidak terjadi instalasi dan/atau kecelakaan kerja selama periode penilaian.

"Setelah kualifikasi terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah penilaian terkait kriteria andal dan aman bagi instalasi, ramah lingkungan, serta aman dari bahaya manusia dan makhluk hidup lainnya," ujar Didit. (u)



Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan

Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyelenggarakan Penghargaan Subroto sebagai penghargaan tertinggi sektor ESDM kepada para pemangku

dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Tahun ini terdapat 27 kategori penghargaan yang dapat diikuti oleh pemilik/pengelola pembangkit sesuai

SMART GRID JADI FAKTOR KUNCI CAPAI NET ZERO EMISSION

Pengembangan jaringan cerdas atau Smart Grid akan menjadi faktor kunci untuk mencapai net Zero Emission (NZE) di sektor pembangkit listrik. Smart grid dapat menghubungkan pulau besar dengan jalur interkoneksi sehingga dapat menghubungkan lokasi sumber pembangkit energi baru terbarukan (EBT) tinggi menuju lokasi demand atau permintaan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara G20 ETWG Parallel Event “Smart Grid Solutions in Accelerating Energy Transition in Southeast Asia” di Bali, (30/08/2022).

Wanhar menyebutkan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung dekarbonisasi di bidang energi yang telah dituangkan dalam Paris Agreement untuk mencapai NZE sebelum tahun 2060. Ia menyebut, target NZE dapat tercapai dengan dukungan pembangunan Smart Grid yang tengah disiapkan di Indonesia.

“Smart grid merupakan faktor kunci untuk mencapai Zero Emission di sektor pembangkit listrik. Ini akan menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia dengan jalur interkoneksi listrik untuk menghubungkan lokasi sumber EBT tinggi menuju lokasi permintaan tinggi,” ungkap Wanhar.

Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa mengenai skema pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengelola sendiri infrastruktur tersebut atau memberikan penugasan kepada anak perusahaan PLN untuk menjalankan pembangunan pembangkit listrik.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang ditetapkan sebagai RUPTL Hijau, Indonesia berencana untuk membangun lebih banyak pembangkit EBT dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

“Kami tidak lagi merencanakan pembangkit listrik tenaga batubara baru, kecuali yang telah financial closing atau sedang dibangun,” ujar Wanhar.

Pilot Project Smart Grid

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia merencanakan untuk mendukung target NZE dengan pengembangan Smart Grid.

“Diantaranya dengan memfasilitasi pengembangan Smart Community Pilot Project di Karawang, Adaptive Defense Scheme di Sistem Jawa Bali, Automatic Dispatch System di Sumba dan Nusa Tenggara Timur, dan Smart Micro Grid di Selayar,” ujar Chrisnawan.

PT PLN (Persero) sendiri disebut Chrisnawan telah menetapkan timeline Smart Grid menjadi dua periode, periode pertama tahun 2021– 2025 yang memiliki inisiatif utama dalam digitalisasi pembangkit, sistem manajemen distribusi, EV charging, Smart Microgrid dan Advanced Metering Infrastructure. Periode kedua tahun 2026 dan selanjutnya, memiliki inisiatif utama pada peningkatan Supervisory Control And Data Acquisition, Interkoneksi sumber daya energi terdistribusi, penyimpanan energi, dan respons permintaan. Smart Microgrid lainnya juga sedang dikembangkan di Indonesia bagian timur yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

“Pengembangan Smart Grid di Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan antara lain ketersediaan mekanisme bisnis dan keuangan, regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta kesiapan teknologi,” tutup Wanhar.

Smart Grid Solutions in Accelerating Energy Transition in Southeast Asia merupakan acara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bekerjasama dengan Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) secara paralel dengan perhelatan ETWG G20 di Bali.

Dalam acara ini dilakukan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah, utilitas, dan partner developments mengenai manfaat pengembangan Smart Grid dan membahas peran masing-masing dalam mempercepat adopsi Solusi Smart Grid untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan energi dan integrasi EBT yang lebih bersih, aman, dan andal. (U)

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Koordinasi Kesiapan Pasokan Energi Listrik dan Keselamatan Operasi Instalasi Tenaga Listrik Untuk Mendukung Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada Senin, (25/07/2022).



PEMERINTAH PASTIKAN PASOKAN LISTRIK KTT G20 BALI

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kesiapan pasokan listrik dalam rangka menyambut acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. Selain pengamanan kelistrikan lokasi venue KTT G20, Kementerian ESDM juga memastikan pengamanan kehandalan pasokan listrik pada seluruh kegiatan utama dan Side Events G20 serta pengamanan kelistrikan Sub Sistem Bali dan Sistem Jawa Bali.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Koordinasi Kesiapan Pasokan Energi Listrik dan Keselamatan Operasi Instalasi Tenaga Listrik Untuk Mendukung Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada Senin, (25/07/2022).

"Dalam rangka menyambut acara KTT G20, pemerintah harus memastikan kesiapan pasokan listriknya," ungkap Nugroho.

Puncak KTT G20 nanti diperkirakan akan dihadiri sekitar 6.500 delegasi asing. Untuk itu PLN diharap dapat melakukan pengamanan Venue Utama Hotel Kempinski dan GWK tempat pelaksanaan Galadiner serta 22 Lokasi Menginap Kepala Negara.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto W.S menyatakan bahwa PT PLN (Persero) siap mengamankan lokasi-lokasi strategis KTT G20.

PLN telah melakukan mitigasi risiko pengamanan kelistrikan mulai dari Operasi Sistem, Pembangkit, Transmisi,



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Koordinasi Kesiapan Pasokan Energi Listrik dan Keselamatan Operasi Instalasi Tenaga Listrik Untuk Mendukung Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali pada Senin, (25/07/2022).

Distribusi, SPKLU dan Beautifikasi Instalasi Ketenagalistrikan. Sejalan dengan hal tersebut maka ditetapkan 123 Action Program untuk menurunkan risiko dalam pengamanan kelistrikan G20 dengan anggaran Rp 1,2 Triliun. Progress s.d 20 Juli 2022 sudah tercapai sebesar 82,64% (Leading terhadap Target 79,31%)," ungkap Haryanto.

Kondisi kelistrikan di Bali saat ini dalam kondisi aman, dimana beban puncak tertinggi tahun 2022 (s.d. Juli) adalah sebesar 837 MW dengan reserve margin 485 MW (37%). Sementara untuk prediksi pelaksanaan KTT G20, beban puncak diperkirakan sebesar 980 MW dengan reserve margin 442 MW (31%). Total daya mampu di Bali untuk pelaksanaan KTT G20 adalah sebesar 1.422 MW yang berasal dari pembangkit di Bali, transfer daya dari Pulau Jawa melalui SKTM Kabel Laut Jawa-Bali dan relokasi pembangkit Grati.

Dalam kesempatan yang sama, EVP Distribusi Regional Jawa Bali PT PLN (Persero) Ari Wardhana menyatakan bahwa mengenai keandalan dan keamanan instalasi listrik di lokasi venue pelaksanaan KTT G20, PLN telah dan akan melakukan assesment instalasi melalui pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik di 30 lokasi yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif).

"Terkait dengan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, PLN akan menyediakan charging station sebanyak 64 unit SPKLU Ultrafast Charging 200 kW ditambah dengan 2 SPKLU mobile di dua lokasi, yaitu Apurva Kempinski (14 shelter dan 28 unit SPKLU) dan Central Parkir ITDC Nusa (18 shelter dan 36 unit SPKLU). Selain itu juga akan dipasang sebanyak 200 unit home charging di 10 lokasi di Bali," ujar Ari. (U)

KESDM LIBATKAN STAKEHOLDER DALAM PENCARIAN LOKASI KERJA PRAKTIK SMK BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melibatkan pemangku kepentingan dalam pencairan lokasi praktek kerja lapangan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang ketenagalistrikan. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho di Semarang, Kamis (04/07/2022) mengungkapkan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Badan Usaha yang bergerak di subsektor ketenagalistrikan akan membantu dalam mencari lokasi praktek kerja lapangan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan melaksanakan praktek kerja sesuai dengan jenis pekerjaan ketenagalistrikan yang akan dituju.

Selain itu, LSK juga akan ikut dalam melakukan sertifikasi kompetensi vokasi secara portopolio kepada peserta didik SMK-perguruan tinggi vokasi. Dengan pencarian lokasi kerja praktek yang dipermudah dan keterlibatan stakeholder dalam sertifikasi kompetensi vokasi secara portofolio, tenaga teknik ketenagalistrikan cepat bekerja untuk memenuhi demand industri masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nugroho saat membuka Rapat Tindak Lanjut Penerapan Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen Pendidikan Vokasi di Auditorium PLN Corporate University Semarang, Jawa Tengah. Rapat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perwujudan realisasi sinergi dan optimalisasi program terkait pengembangan kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) di bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati.

"Maksud diadakan PKS ini untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan pengembangan kompetensi SMK dan PTV di bidang Ketenagalistrikan," ujar Nugroho.

Lebih lanjut Nugroho menyebutkan, Ruang lingkup kerja sama Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen Pendidikan Vokasi meliputi penyelarasan kurikulum di bidang ketenagalistrikan, peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di SMK dan PTV. Selain itu PKS juga terkait penyediaan Guru/pendidik tamu praktek kerja lapangan dan/atau magang, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, penelitian terapan bersama, dan pertukaran data dan informasi.

Standar Kompetensi Harus Ikuti Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan penerapan digitalisasi disebut Nugroho dapat menimbulkan jenis-jenis pekerjaan baru di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu menurutnya Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang disusun harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan selalu diperbaharui sesuai jenis pekerjaan baru tersebut.

"Hal ini sangatlah penting mengingat bahwa tenaga teknik kompeten adalah penggerak utama pada usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan serta mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan dan tentunya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif tenaga teknik itu sendiri," ungkap Nugroho.

Kegiatan belajar mengajar vokasi terus didorong agar selalu menerapkan model link and match antara dunia pendidikan dengan usaha ketenagalistrikan. Model pendidikan tersebut sangat diperlukan dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung program penyediaan tenaga listrik nasional.

Sinergi antara pendidikan vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan nasional demi terciptanya lingkungan kolaboratif dan kondusif serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta calon angkatan kerja. "Tanpa sinergi yang baik, tentunya arah pendidikan vokasi Indonesia tidak akan pernah sampai pada tujuan utama, yakni memenuhi demand industri masa depan," kata Nugroho.

Tujuan akhir dari pengembangan pendidikan vokasi adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi di industri - industri strategis. Di sisi lain, industri memiliki atau mengikuti standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan vokasi. Harmonisasi hubungan antara industri dengan pendidikan vokasi ini dibangun melalui pola kemitraan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Di akhir acara dilakukan penyerahan sertifikat kompetensi vokasi dan proserat skema portofolio, serta pendataan sekolah, lokasi, jumlah peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan. (AT)

PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-77, SEMUA HARUS BANGKIT DARI PANDEMI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (17/08/2022). Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu selaku pemimpin upacara menyampaikan bahwa dalam masa pandemi kita harus bangkit untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Dalam menghadapi Pandemi ini, kita harus segera bangkit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ungkap Jisman menyampaikan sambutan dari Menteri ESDM.

Lebih lanjut Jisman menyampaikan bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Sesuai dengan Tema peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", maka semua harus bangkit terutama dalam melaksanakan perwujudan energi berkeadilan pada sektor ESDM dengan lima pilar utama yaitu peningkatan rasio elektrifikasi, pemerataan & keterjangkauan, keberlanjutan, investasi dan pertumbuhan, serta reformasi birokrasi.

"Masih banyak saudara kita yang belum pernah menikmati listrik sama sekali, masih ada saudara kita yang belum menikmati harga BBM yang terjangkau. Hal tersebut hanya merupakan sebagian kecil tantangan yang kita hadapi, maka perlu suatu lompatan inovasi birokrasi dalam menyelesaikan segala permasalahan di sektor ini," ujar Jisman.

Paradigma pengelolaan energi dan sumber daya mineral disebut Jisman telah mengalami perubahan yang semula sebagai sumber pendapatan Negara, sekarang menjadi penggerak perekonomian Negara. Hal ini harus dijadikan penyemangat bagi anak bangsa Indonesia sebagai aktualisasi



kekuatan diri melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku secara merdeka dan lebih kompetitif, berintegritas, serta bekerja untuk kemakmuran rakyat dalam menghadapi persaingan global.

"Selain itu, saya juga meminta kepada seluruh pihak untuk bekerja dengan lebih efektif, dan mewujudkan efisiensi serta tetap optimis dalam memandang masa depan. Kita harus tetap solid dalam bekerja," tuutp Jisman.

Upacara HUT Ke-77 Kemerdekaan RI

Upacara bendera peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan di halaman depan gedung Seomantri Brodjonegoro I Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Upacara dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dan dihadiri sekitar 283 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan. Selain itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mengirimkan 12 perwakilan pegawai untuk mengikuti upacara di halaman Gedung Heritage Kementerian ESDM dengan berbusana adat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. (U)



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka acara Sharing Session Pembekalan Frontliner Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (12/08/2022).

FRONTLINER PELAYANAN PUBLIK BAWA NAMA BAIK INSTANSI

Tugas dari frontliner tidak hanya memberikan informasi dan pelayanan pada tamu, namun juga membawa nama baik dari instansi. Untuk itu, seorang frontliner harus berpenampilan dan bersikap baik karena citra instansi dipertaruhkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Sharing Session Pembekalan Frontliner Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (12/08/2022).

Menurut Ida, sharing session ini dimaksudkan agar para petugas pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan mendapatkan

kiat-kiat untuk menjalani tugas dengan rasa keikhlasan, dan bagaimana bersikap dalam melayani tamu. Melalui sharing session ini juga, diharapkan para frontliner pelayanan publik dapat menjadi pribadi-pribadi profesional.

“Jika para frontliner bekerja optimal, hal ini tentu akan meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” ujar Ida.

Melalui sharing dari Age Perubahan, Ida berharap para frontliner mendapatkan sharing pengalaman dari kunjungan benchmarking pelaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi ke Pusat

Pembangunan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu pada bulan Oktober 2021 lalu. Melalui benchmarking ke PPSPDM Migas Cepu, diharapkan dapat diaplikasikan pada pelayanan publik Ditjen Ketenagalistrikan.

“Dulu teman-teman sudah pernah ke Cepu, disana sudah bagus, kita belajar dari mereka, dan mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu kita,” kata Ida.

Pranata Humas Madya Pandu Satria Jati selaku narasumber pertama kegiatan ini membagikan materi tentang Kemampuan Dasar Frontliner dan Sharing Session Studi Banding Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada PPSDM Migas.

"Kita harus memiliki sikap positif walaupun kita memiliki masalah di luar kerjaan tapi ketika sudah di posisi sebagai frontliner kita harus melayani dengan sepenuh hati", ujar Pandu.

Mengenalkan Core Values ASN

Kesempatan ini juga digunakan Agen Perubahan Ditjen Ketenagalistrikan untuk menyosialisasikan Core Values ASN. Salah satu core values ASN yang terkenal dengan akronim Ber-AKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan. Panduan perilaku dari nilai ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Pada sharing session ini juga diberikan sosialisasi panduan perilaku dari nilai-nilai yang diharapkan dapat diinternalisasi untuk seluruh pegawai yang dimulai dengan frontliner pelayanan publik.

Narasumber kedua, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Malika Alia Rahayu menyampaikan materi tentang Internalisasi Core Values Ber-AKHLAK pada Frontliner.



"Dengan mengamalkan Core Values ASN ini, maka akan memberikan nilai positif kepada diri pegawai, dan pengamalan Core Values ASN akan meningkatkan akseptabilitas pegawai dimanapun berkarir di masa yang akan datang" ujar Malika.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan bersama Agen Perubahan yang bertujuan memberikan pembekalan bagi pegawai, khususnya di frontliner dan petugas pelayanan



publik yang setiap harinya bertatap muka dengan para penerima layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pembekalan Frontliner ini juga dimeriahkan dengan pembagian kuis, selain itu penanya terbaik mendapatkan souvenir dari Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. (AT)





Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggandeng Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat (ISEI Jabar) dalam Forum Diskusi Publik "Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Bantuan Pasang Baru Listrik Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau" di Bandung, Rabu (10/8/2022).

KEMENTERIAN ESDM

GANDENG ISEI JAWA BARAT

SOSIALISASIKAN PROGRAM INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggandeng Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat (ISEI Jabar) dalam mensosialisasikan program-program strategis ketenagalistrikan kepada masyarakat di Jawa Barat. Sosialisasi dan penyerapan aspirasi tersebut dilaksanakan melalui Forum Diskusi Publik "Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Bantuan Pasang Baru Listrik Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau" di Bandung, Rabu (10/8/2022).

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan secara merata di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut juga diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi hijau, dan dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan energy transition road map sebagai strategi untuk mencapai target penurunan emisi sekitar 1,526 juta ton CO2 pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Peta jalan ini akan menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 di sektor energi.



"Sejalan dengan Energy Transition Roadmap tersebut, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk 10 tahun ke depan yang dikenal sebagai RUPTL PLN "HIJAU" (2021-2030), dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT)," jelas Ida.

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto WS dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa PLN berkomitmen melaksanakan transisi energi yang dituangkan dalam RUPTL 2021-2030. Proposi penambahan pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL tersebut ditargetkan akan mencapai 20,92 GW atau 51,6% dari total kapasitas pembangkit listrik.

"Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang diperkirakan akan mendominasi dan memegang peranan penting dalam proses transisi energi bersih di Indonesia mengingat potensinya yang besar," ucap Haryanto.

Selaras dengan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih sebagai salah satu narasumber kegiatan tersebut mengatakan bahwa kebijakan untuk mencapai target rendah emisi merupakan upaya menuju ekonomi hijau.

"Ekonomi hijau sendiri adalah bagaimana kita menciptakan kebijakan-kebijakan low carbon growth, kemudian bagaimana kita memanfaatkan resources yang ada dengan sangat efisien, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi," ungkap Ai.

Melalui berbagai program seperti percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan peningkatan pembangkit berbasis EBT, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mewujudkan ekonomi hijau tersebut.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat M. Fani Cahyandito mengatakan bahwa konsep ekonomi hijau merupakan penopang visi pembangunan berkelanjutan, dimana keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan dampak bagi pencapaian keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam.

"Transformasi ekonomi hijau dalam berbagai sektor industri dan jasa termasuk pada subsektor ketenagalistrikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana ekologis maupun kesenjangan sosial," ujar Fani.

Kegiatan Forum Diskusi Publik ini menghadirkan aspek pentahelix dimana beberapa pihak berdiskusi memberikan



sumbang saran bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Jawa Barat dan PT PLN (Persero), hadir pula sebagai narasumber Tenaga Ahli Bidang Energi, Kantor Staf Presiden Ahmad Agus Setiawan, dan Environmental Economist & Co-Founder Think Policy Andhyta F. Utami.

Dalam kesempatan itu Andhyta mengajak generasi muda bisa turut mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dengan melakukan apa yang bisa dilakukan.

"Sebagai orang muda kita suka berpikir bahwa kita adalah orang yang diluar sistem, tapi tidak juga karena banyak orang muda yang masuk di dalam sistem, jadi kita harus punya mindset apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada," ujar Andhyta.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari memberikan apresiasi kepada ISEI atas kerjasamanya dalam membuat forum diskusi ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat yang telah bekerjasama dengan kami menyelenggarakan kegiatan ini. Kami harap dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan subsektor ketenagalistrikan serta mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait program BPBL untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau," tutup Ida. (U)

ENERGY WATCH

APRESIASI PEMERINTAH TAK NAIKKAN TARIF LISTRIK UNTUK GOLONGAN SUBSIDI



Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah karena tidak menerapkan *Tariff Adjustment* kepada golongan pelanggan subsidi dalam webinar "Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?" yang diselenggarakan oleh Ruang Energi, Kamis (30/06/2022).

Direktur Eksekutif *Energy Watch* Mamit Setiawan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah karena tidak menerapkan *Tariff Adjustment* kepada golongan pelanggan subsidi. Ia menyebut kebijakan tersebut sudah tepat dan mengedepankan aspek berkeadilan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam webinar "Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?" yang diselenggarakan oleh Ruang Energi, Kamis (30/06/2022).

"Pemerintah masih hadir dengan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk golongan subsidi," ujar Mamit.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. Penyesuaian tarif ini diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan

P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Keseluruhannya adalah golongan pelanggan nonsubsidi.

Mamit lantas menyampaikan perlu adanya tata kelola organisasi di PLN mengingat saat ini organisasi PLN begitu besar. Ia juga menekankan PLN harus tetap efisien dalam menjalankan kegiatan operasional.

Senada dengan Mamit, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Jisman juga mengatakan efisiensi PLN sangat diperlukan.

"Kami di pemerintah mendorong PLN agar terus melakukan langkah-langkah efisiensi baik di administrasi, pengendalian penggunaan BBM, dan Meskipun demikian, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam kesempatan yang sama menyatakan dampak penyesuaian akan

ada pada tagihan bulan Agustus 2022.

"Apakah pelanggan pascabayar mulai naik per Juli? Belum. Pemakaian bulan Juli, akan dibayarkan pada bulan Agustus. Kalau ada kenaikan sebelum Agustus, itu bukan kenaikan tarif tapi karena kenaikan pemakaian listrik," tutur Bob.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan PLN untuk melaksanakan kebijakan *Tariff Adjustment* pada triwulan III tahun 2022.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai penetapan tarif listrik oleh Pemerintah selalu penuh dilema antara memenuhi harapan publik dengan keterbatasan anggaran. Namun, ia menyampaikan perlunya tarif listrik mencapai titik equilibrium antara keuntungan PLN sebagai *single off-taker* ketenagalistrikan dan kemampuan konsumen dalam membelanjakan pendapatan untuk membeli listrik. "PLN sebagai BUMN tidak boleh terus

BPP TENAGA LISTRIK PT PLN (PERSERO)

DAFTAR DAHAYU DASAR: 330,04 (10,1%)
 BPP TENAGA LISTRIK: Rp.587,03 Triliun
 DAFTAR DAHAYU LAIN: 4,36 (1,1%)
 BPP TENAGA LISTRIK: Rp.127,45 Triliun

YOLINE PRODUKSI SENDIRI
 Rp.372,08 Triliun

BPP tenaga listrik rata-rata ditambah margin usaha (7%) Rp1.568,42/kWh, dengan rincian:

- BPP Tegangan Tinggi: Rp1.409,38/kWh;
- BPP Tegangan Menengah: Rp1.469,11/kWh;
- BPP Tegangan Rendah: Rp1.639,53/kWh;

Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?

Golongan Tarif Pelanggan di PLN (Sesuai Femen ESDM No. 28 Tahun 2014)

No.	Kategori Tarif	Kategori Pelanggan	Kategori	No.	Kategori Tarif	Kategori Pelanggan	Kategori
1	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	31	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
2	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	32	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
3	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	33	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
4	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	34	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
5	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	35	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
6	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	36	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
7	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	37	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
8	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	38	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
9	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	39	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
10	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	40	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
11	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	41	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
12	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	42	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
13	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	43	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
14	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	44	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
15	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	45	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
16	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	46	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
17	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	47	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
18	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	48	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
19	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	49	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
20	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	50	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
21	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	51	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
22	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	52	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
23	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	53	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
24	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	54	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
25	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	55	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
26	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	56	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
27	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	57	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
28	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	58	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
29	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	59	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
30	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	60	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
31	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	61	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
32	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	62	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
33	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	63	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
34	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	64	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
35	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	65	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
36	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	66	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
37	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	67	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
38	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	68	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
39	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	69	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
40	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	70	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
41	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	71	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
42	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	72	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
43	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	73	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
44	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	74	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
45	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	75	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
46	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	76	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
47	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	77	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
48	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	78	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
49	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	79	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
50	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	80	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
51	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	81	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
52	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	82	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
53	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	83	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
54	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	84	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
55	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	85	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
56	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	86	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
57	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	87	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
58	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	88	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
59	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	89	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
60	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	90	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
61	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	91	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
62	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	92	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
63	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	93	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
64	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	94	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
65	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	95	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
66	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	96	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
67	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	97	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
68	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	98	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
69	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	99	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000
70	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000	100	R1.1.1.1.1.1.1	100	1000000

Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?

PERSOALAN TARIF KETENAGALISTRIKAN TO DATE

- Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan) dalam menetapkan TDL selalu penuh diawasi antara pemerintah, swasta dan keterlibatan anggaran.
- Persepsi keterlibatan dan harga energi primer terkait pengusahaan sumber daya alam (hidroelektrik) dan pengalihan (BBM) oleh sekelompok orang atau minimnya pengusahaan negara atas SDA membuat PT PLN (Persero) sulit melangkah.
- Kebijakan energi pemerintah terus berubah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, persoalan pemeliharaan tarif, berbagai peran dari sistem energi dan pandemi membuat prediksi kebutuhan dan keterlibatan ketenagalistrikan tidak merata dan terkendala (35 ribu MW). Sebagian daerah berlibat dan sebagian masih kekurangan.
- Kebijakan EBT masih sulit dikembangkan bukan hanya kendala teknis saja tetapi juga ekonomi, sosial dan budaya sehingga kebijakan bahan energi yang lebih cepat sulit dikembangkan.
- TDL terus mencapai titik ekuilibrium antara keuntungan PT PLN sebagai single offshore ketenagalistrikan dan kemampuan konsumen dalam melaksanakan partisipasi untuk membeli listrik secara berkeadilan.
- PT PLN (Persero) sebagai BUMN tidak boleh terus merugi, sehingga pemerintah perlu melakukan segmentasi konsumen dan pemberian insentif mulai dari subsidi dan penugasan.

Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?

Webinar "Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?"

Webinar ini diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan penerapan *Tariff Adjustment* kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh media dan terbuka untuk umum, serta dimoderatori oleh Brigita Manohara. (AMH)

merugi, sehingga Pemerintah perlu melakukan segmentasi konsumen dan pemberian insentif mulai dari subsidi dan penugasan," ujar Agus.

Penerapan *Tariff Adjustment* pada triwulan III tahun 2022 hanya menyasar pelanggan rumah tangga sangat mampu (R2) dan mewah (R3) serta pemerintah. Pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan untuk pelanggan R3.

Pelanggan Pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271.000/bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74/kWh menjadi Rp1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta/bulan.

Data dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan R2, R3, dan Pemerintah pada triwulan III tahun 2022 ini berdampak kecil terhadap inflasi sekitar 0,019%. Dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat.

Webinar "Keadilan Tarif Dasar Listrik, Perlukah Dilakukan Penyesuaian?" diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan penerapan *Tariff Adjustment* kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh media dan terbuka untuk umum, serta dimoderatori oleh Brigita Manohara. (AMH)

DORONG PERCEPATAN KBLBB, PEMERINTAH TINGKATKAN JUMLAH SPKLU DAN SPBKLU

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Program KBLBB diharap menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian energi domestik melalui pengurangan ketergantungan impor BBM.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara E-Mobility Day yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) di Bali pada Minggu, (24/07/2022).



“Dalam pengelolaan sektor energi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketahanan energi nasional (national energy security). Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong kemandirian energi domestik melalui pengurangan ketergantungan impor BBM dimana salah satunya dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan,” ungkap Nugroho mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Menurut Nugroho, hingga saat ini secara total telah terdapat sebanyak 332 Unit SPKLU/Charging Station di 279 lokasi publik dan juga terdapat 369 Unit

SPBKLU/Battery Swap Station tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk diantaranya SPKLU/Charging Station di destinasi pariwisata, misalnya dalam rangka Presidensi G20 telah dibangun 24 Charging Station di 17 Lokasi di Pulau Bali (2 diantaranya adalah unit UltraFast Charging 200kW). Selain itu, SPKLU juga telah dibangun di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.



<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2022/07/e-mobility-day-exhibition-ekosistem-kendaraan-listrik-terbesar-besutan-pln-di-bali-dari-touring-pameran-sampai-test-drive>

“Diharapkan dengan jumlah SPKLU yang semakin banyak, dan dibarengi teknologi pengisian yang makin maju, proses pengisian ulang baterai kendaraan listrik hanya memerlukan waktu pengisian baterai antara 30 s.d. 90 menit, sehingga dapat membuat mobil listrik makin menarik bagi para pengguna kendaraan bermotor,” jelas Nugroho.

Kementerian ESDM secara aktif melaksanakan program konversi motor BBM ke motor listrik. Sejak launching tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan akhir 31 Desember 2021 telah dilakukan rangkaian proses mulai penyusunan desain teknis, penyiapan anggaran dan biaya, penyiapan sepeda motor, proses pengadaan komponen, proses pelatihan, proses konversi, uji ketahanan hasil konversi, proses uji tipe dan proses perubahan STNK & BPKB di Kepolisian dari 100 unit sepeda motor kendaraan operasional KESDM. Sementara pada Tahun 2022 ini ditargetkan sebanyak 1000 unit sepeda motor dari Kementerian/ Lembaga dan BUMN dapat dikonversi menjadi motor listrik.

Saat ini, Kementerian ESDM juga sedang dalam proses merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 sebagai upaya untuk semakin

mempercepat jumlah sebaran SPKLU dan SPBKLU, melalui proses perizinan dan persyaratan teknis yang lebih fleksibel dan insentif-insentif lainnya.

EMobility Day

Emobility Day adalah acara yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, untuk mempercepat terciptanya ekosistem KBLBB di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Juni 2022 PLN telah mengoperasikan 139 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik.

“Itu semua kita lakukan untuk memberikan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Nugroho mengapresiasi program Emobility ini karena telah mendukung program nasional dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Indonesia dengan berpartisipasi dalam Percepatan Program KBLBB.

“Diharapkan kegiatan ini menjadi trigger positif bagi para pelaku usaha dan pemerintah daerah lainnya untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB, sehingga dapat mendukung program nasional percepatan KBLBB,” tutup Nugroho. (u)

DITJEN GATRIK GELAR FORUM BERTUKAR PENGALAMAN KERJA ANTAR UNIT

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sediakan forum untuk pegawai agar dapat saling bertukar pengalaman, dan dapat memahami apa yang dikerjakan oleh unit lain melalui acara Ngobrol Pintar (NgoPi) bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Pandu Satria Jati pada acara Ngopi @perpus. gatrik dengan tema: Sharing Session “Si Ujang Gatrik”, Jumat (16/09/2022).

“Dengan diskusi yang dilaksanakan selama acara, diharapkan dapat memberikan wawasan dan mensinergikan program kerja dari masing-masing unit kerja,” ujar Pandu.

Pandu menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan sharing dari pegawai yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ia mengatakan peningkatan kinerja organisasi adalah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

“Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan bekal pengetahuan dan sharing dari pegawai yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” ujar Pandu.

Layanan publik yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Aplikasi ‘Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik’ atau Si Ujang Gatrik. Seperti kita ketahui, layanan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan aspek keselamatan pada sektor ketenagalistrikan. Aplikasi ‘Si Ujang Gatrik’ ini merupakan integrasi dari beberapa

sistem online terkait layanan ketenagalistrikan, yakni sistem Sertifikasi Laik Operasi (SLO), Sertifikasi Badan Usaha (SBU), dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

Pandu mengatakan melalui Si Ujang Gatrik, diharapkan masyarakat dan para pelaku usaha di subsektor ketenagalistrikan dapat dengan mudah menemukan dan mengakses penyedia jasa penunjang tenaga listrik, khususnya badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang terdekat dari lokasi dan telah memiliki perizinan berusaha.

“Inovasi-inovasi seperti Si Ujang Gatrik ini tentunya perlu terus didorong. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai pada core values Ber-AKHLAK, yakni Adaptif atau kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan-perubahan,” kata Pandu.

Inspektur Madya Elif Doka Marliska hadir sebagai narasumber menyampaikan materi lebih Dekat Layanan Si Ujang. Ia menyebutkan bahwa aplikasi Si Ujang

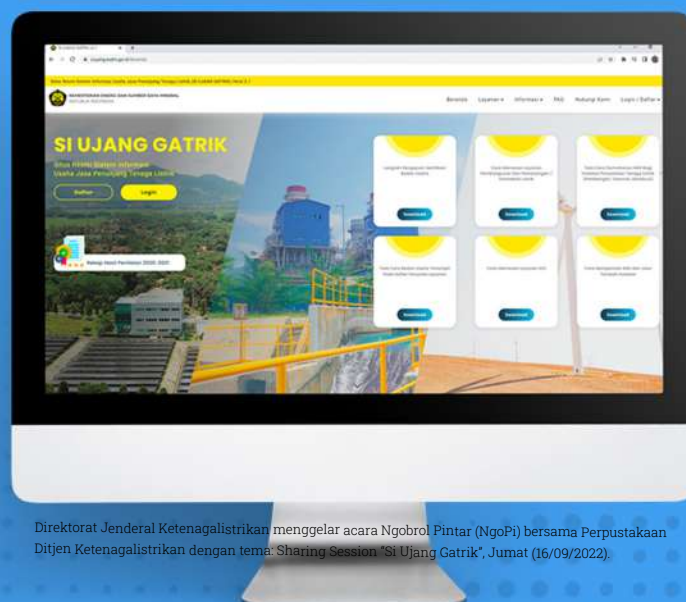
merupakan aplikasi untuk mendukung pemenuhan keselamatan di dalam sektor ketenagalistrikan.

“Dengan Si Ujang Gatrik yang mengintegrasikan layanan sertifikasi dan layanan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan serta menciptakan lapangan kerja,” ujar Elif.

Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik

Ngobrol Pintar (NgoPi) bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan bagian dari Forum Literasi Ketenagalistrikan yang diharapkan dapat menjadi sarana belajar, menambah wawasan, serta peningkatan kemampuan public speaking pegawai yang difasilitasi oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan.

Selain ngopi @Perpus.Gatrik, kegiatan forum literasi lainnya adalah kegiatan Baper atau Bedah paper, Bedah Buku Battle Series, bedah buku teknik, dan Alumni Talk. (AT)



PEMERINTAH APRESIASI DUKUNGAN MKI UNTUK KETENAGALISTRIKAN BERKELANJUTAN

Pemerintah mengapresiasi Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) atas dukungannya untuk ketenagalistrikan berkelanjutan. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho menyampaikan hal tersebut dalam Launching Buku Dewan Pakar MKI, Kamis (15/9/2022), di Jakarta.

Menurutnya, tujuan serta upaya-upaya pemerintah tidak dapat tercapai dan berhasil tanpa partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh MKI, yang kami lihat sebagai upaya nyata untuk mendukung pemerintah dalam memajukan ketenagalistrikan di Indonesia," tutur Nugroho.

Acara launching Buku Dewan Pakar MKI "Mewujudkan Ketenagalistrikan Nasional yang Berkelanjutan" ini merupakan bagian dalam HUT ke-24 MKI. Dalam acara ini, ada paparan Buku Dewan Pakar MKI oleh Heru Dewanto dan paparan Hari Listrik Nasional ke-77 oleh Noersita

Indriani.

"Kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 kepada MKI. Kami berharap kerja sama dan koordinasi yang baik antara MKI dan Pemerintah dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang," tuturnya.

Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

Dalam kesempatan yang sama, Nugroho menyampaikan pentingnya keselamatan ketenagalistrikan. Menurutnya, para pemangku kepentingan termasuk MKI perlu untuk memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan dalam mewujudkan energi berkelanjutan.

"Penyediaan tenaga listrik juga harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, yang memiliki tiga tujuan dalam penerapannya, yaitu andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta yang terakhir adalah ramah lingkungan," ia

mengungkapkan.

Nugroho menuturkan keselamatan ketenagalistrikan wajib diterapkan pada setiap instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, serta peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

"Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan tersebut harus memenuhi beberapa aspek, di antaranya setiap instalasi listrik harus memiliki Sertifikat Laik Operasi, dan setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik," jelasnya.

Ia melanjutkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi, setiap peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia, serta setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan di bidang lingkungan hidup. (AMH)



Launching buku oleh Dewan Pakar MKI, Kamis



Kick-Off Ceremony & Showcase Exhibition dan Penandatanganan MoU PLN – Hyundai Kefico Cooperation, Selasa (19/07/2022).

Pemerintah Dukung Program KBLBB DALAM TINGKATKAN EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI

Program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik, juga membawa kontribusi besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho pada Kick-Off Ceremony & Showcase Exhibition dan Penandatanganan MoU PLN – Hyundai Kefico Cooperation, Selasa (19/07/2022).

“Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % dengan kerja sama internasional dari kondisi business as usual (BaU) setara dengan sebesar 314 – 446 Juta Ton CO₂ pada tahun 2030,” ujar Nugroho.

Dalam pengelolaan sektor energi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketahanan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong kemandirian energi domestik melalui pengurangan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Hal tersebut tentunya akan membawa dampak positif terhadap penurunan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM. Penggunaan kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan tentu secara nyata akan mengurangi penggunaan BBM ini,” ujar Nugroho.

Hingga saat ini terdapat sekitar 115 juta motor BBM di Indonesia, jika diasumsikan rata-rata menggunakan BBM sebanyak 1 liter per hari, maka dibutuhkan BBM sebanyak 723 ribu barel/hari atau setara

72 juta USD/hari, hal tersebut melebihi produksi minyak nasional yaitu di bawah 700 ribu barel/hari.

“Dengan asumsi 1 liter BBM setara dengan 1,2 kWh, maka jika seluruh motor BBM dikonversi menjadi motor listrik, dapat meningkatkan konsumsi listrik sebesar 0,138 TWh/hari dan dapat meningkatkan penjualan listrik PLN sebesar Rp. 226,3 Miliar/hari,” kata Nugroho.

Apabila hanya sekitar 5% (sekitar 6 juta) dari jumlah motor bensin yang dapat dikonversi menjadi motor listrik, maka dapat diperoleh penghematan BBM sebanyak 37 ribu barel/hari atau sekitar 3,7 juta USD/hari dengan peningkatan konsumsi listrik sebesar 7.200 GWh dan penjualan listrik PLN sebesar Rp. 11,8 Miliar/hari. Sementara, jika hanya sekitar 1 juta jumlah motor bensin dikonversi menjadi motor listrik maka akan menghemat BBM sebanyak 6 ribu barel/hari atau sekitar 0,6 juta USD dan dapat meningkatkan konsumsi listrik sebesar 1200 GWh dan penjualan listrik Rp. 1,9 Miliar/hari.

“Bagi pemilik motor, dengan asumsi biaya konversi sebesar 5 juta rupiah, dimana total biaya konversi sebesar 12 Juta rupiah, sehingga diasumsikan 7 juta rupiah merupakan insentif dari pemerintah, maka biaya penghematan yang dapat diperoleh dari konversi motor bensin ke motor listrik adalah sebesar 2,2 juta per tahun dengan menggunakan bahan bakar pertalite seharga Rp. 7.650/liter” ujar Nugroho.

Sampai kini terdapat Charging Station sebanyak 332 Unit di 279 lokasi publik, dan terdapat sebanyak 369 Unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap dengan teknologi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang semakin maju, proses pengisian ulang baterai kendaraan listrik hanya memerlukan waktu pengisian baterai 30 hingga 90 menit dan diharapkan dengan adanya SPBKLU masyarakat dapat beralih ke motor listrik.

“Kementerian ESDM secara aktif melaksanakan program konversi motor BBM ke motor listrik, sampai dengan akhir Desember 2021 telah dikonversi 100 unit sepeda motor kendaraan operasional KESDM dari 14 unit satuan kerja yang berlokasi di Jabodetabek dan Bandung,” ungkap Nugroho.

Kick Off Ceremony & Showcase Exhibition

PT PLN (Persero) memperkuat pondasi ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), khususnya untuk kendaraan listrik roda dua di Indonesia melalui sinergi bersama Hyundai Kefico and Consortiums. Keduanya bersepakat untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air dengan membangun pabrikasi motor listrik serta infrastruktur dan operasi stasiun penukaran baterai motor listrik di Indonesia. Pada tahap awal, keduanya merancang model bisnis yang tepat untuk mengakselerasi ketersediaan infrastruktur dan komponen kendaraan listrik roda dua.

Kerja sama antara PLN dengan Hyundai Kefico and Consortiums yang meliputi penyediaan aspek-aspek penting kendaraan listrik seperti mesin penggerak, komponen, baterai, hingga manajemen servisnya disepakati dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani di sela acara Kick Off Ceremony dan Showcase Exhibition. (AT)





Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan "Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomi PLTS Atap" di Jakarta, Jumat (15/07/2022).

SHARING PENGALAMAN BADAN USAHA SEBAGAI MASUKAN PENYUSUNAN REGULASI PLTS ATAP

Dalam melakukan penyusunan regulasi, Pemerintah membutuhkan masukan dari pelaku usaha agar regulasi yang diterbitkan dapat diterapkan dengan tepat. Untuk itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan sharing session Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomi PLTS Atap dimana pelaku usaha sharing terkait pengalaman dalam pembiayaan dan pengembangan PLTS Atap. Acara ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kementerian ESDM dalam membuat regulasi yang tepat terkait pengembangan PLTS Atap.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan (NgoPi@perpus.gatrik) "Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomi PLTS Atap" di Jakarta, Jumat (15/07/2022).

"Sharing pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi teman-teman Kementerian ESDM untuk membuat regulasi yang lebih tepat terkait

pengembangan PLTS Atap,” ujar Ida.

Pemerintah mendorong peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, salah satunya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Kolaborasi dari semua pihak dirasa penting dalam mensukseskan program PLTS Atap ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, komunitas, serta masyarakat umum berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dengan tujuan yang sama, melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil untuk beralih menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa keberadaan PLTS Atap turut membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Berbeda dengan energi fosil, pemanfaatan PLTS tidak menyumbang gas rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu permukaan bumi.

“Meskipun regulasi terkait PLTS Atap telah disusun, namun pengembangan PLTS Atap belum seperti yang kita harapkan,” ungkap Ida.

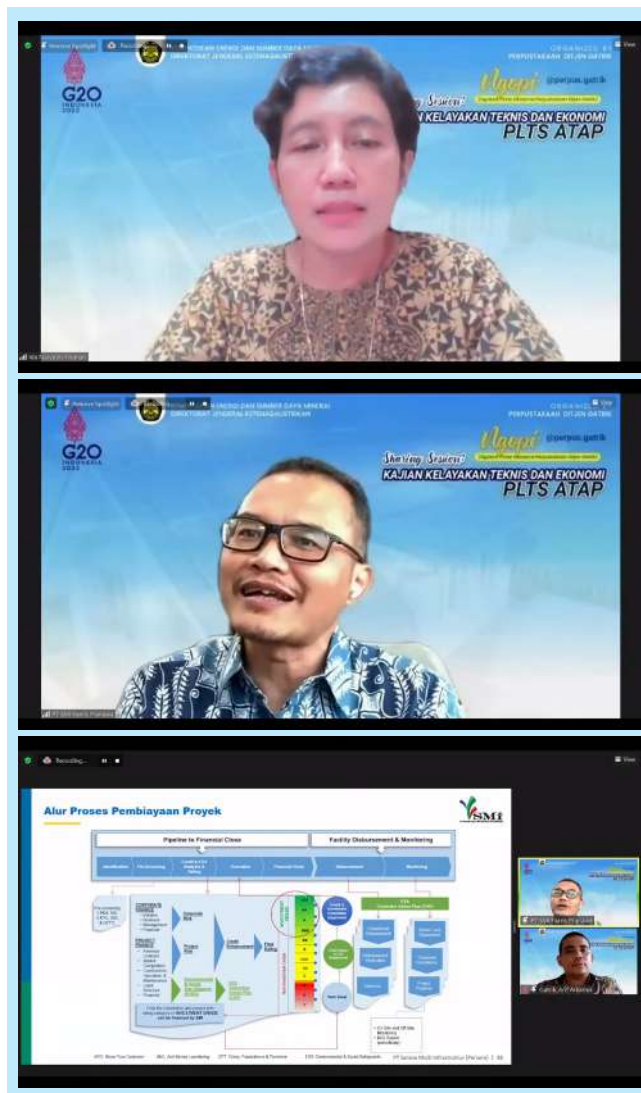
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Faaris Pranawa menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga masalah dalam pengembangan PLTS Atap di Indonesia. Diantaranya mengenai pertumbuhan PLTS Atap yang masih jauh dari target dan concern PT PLN (Persero) dalam penetrasi PLTS Atap seperti pemenuhan persyaratan teknis operasi paralel PLTS dengan jaringan PLN.

“Kemudian mengenai aspek keekonomian, kehadiran Permen (Peraturan Menteri) ESDM No. 26/2021 belum dapat secara maksimal men-trigger deployment PLTS Atap,” ungkap Faaris.

Faaris kemudian membandingkan dengan studi kasus di negara Vietnam yang sudah sangat maju pertumbuhan PLTS Atapnya. Untuk itu aspek regulasi seperti strategi pemerintah, aspek teknis pengoperasian PLTS Atap, dan aspek keekonomian harus diperhatikan agar masuk nilai keekonomian yang layak untuk meningkatkan pengembangan PLTS Atap.

Sharing pengalaman dari pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh Faaris ini disebut Ida akan menjadi masukan bagi Kementerian ESDM dalam menuangkan kedalam petunjuk teknis.

“Sharing seperti ini sangat bagus dilakukan, dan diharapkan kedepannya akan kembali dilakukan sharing stakeholder bersama dengan PT PLN (Persero) tentang PLTS Atap,” tutup Ida. (u)





kerangka hukum dan peraturan untuk program elektrifikasi off-grid.

Regulasi pendukung untuk berbagai model bisnis

Birokrasi yang masih panjang pada proses perolehan izin wilayah usaha berdasarkan Permen ESDM No. 38 Tahun 2016 telah menurunkan kepercayaan investor dan pengembang. Sebagai hasil dari rekomendasi, model bisnis micro-IPP dan KSO lebih diminati karena kedua

PROGRAM ELEKTRIFIKASI SELURUH PENJURU NEGERI: PENANTIAN CAHAYA TERANG HASIL KONSULTASI PUBLIK PENYEDIAAN LISTRIK PEDESAAN MELALUI MODEL BISNIS MICRO IPP DAN KSO

Oleh: MENTARI

Latar Belakang

Program elektrifikasi seluruh penjuru negeri adalah tugas yang sulit dilakukan terlepas dari apapun bentuk geografis suatu negara. Hal ini menjadi lebih sulit bagi negara kepulauan seperti Indonesia, di mana akses terbatas, ketersediaan teknologi dan suku cadang serta permintaan energi yang rendah, dan pertumbuhan yang tidak pasti. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan utama dalam keberhasilan implementasi elektrifikasi di Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,4% pada tahun 2021, masih terdapat 466.000 rumah tangga di 316 desa yang tidak mempunyai akses listrik yang bersih dan terjangkau (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/KESDM, 2021).

Dalam rangka meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kerajaan Inggris melalui Program Menuju Transisi

Rendah Karbon Indonesia (MENTARI) melakukan kajian Mobilising The Off-Grid Power Supply in Indonesia: Business Model Analysis. Pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilakukan konsultasi publik tentang progres regulasi untuk menyediakan listrik pedesaan melalui model bisnis yang berbeda, yaitu Micro Independent Power Producer (Micro-IPP atau penyedia listrik independen) dan Kerja sama Operasi (KSO).

Mengingat meningkatnya kebutuhan untuk mempercepat penggunaan sistem off-grid, forum tersebut mendiskusikan berbagai sudut pandang pihak. Forum tersebut menyoroti empat poin penting: (1) regulasi yang mendukung (termasuk izin wilayah usaha dan kerangka peraturan untuk model bisnis baru), (2) tarif yang berkelanjutan dan kebutuhan akan mekanisme subsidi, (3) isu komersial, dan (4) transparansi data publik. Panelis pada forum tersebut setuju bahwa terdapat kesenjangan dalam

model tersebut turut melibatkan PLN dan tidak memerlukan izin wilayah usaha untuk beroperasi.

Rekomendasi regulasi

Pengembang telah belajar bagaimana model bisnis ini dapat berlaku melalui kerjasama dengan PLN; bagaimanapun juga, belum ada regulasi dasar mengenai skema prosedur dan mekanisme serta kejelasan dan transparansi selama pengembangan proyek-proyek tersebut. Panelis menyarankan beberapa perubahan berikut:

- Untuk KSO, tarif harus ditetapkan sebagai nilai yang wajar agar proyek dapat beroperasi.
- Untuk micro-IPP, perlu untuk membuat mekanisme tersendiri yang membedakannya dari prosedur penyedia listrik independen (IPP) saat ini, terutama dalam persyaratan pembiayaan dan kriteria teknis serta kelembagaan.

Tarif

Dengan adanya regulasi tarif energi terbarukan berdasarkan Permen ESDM No. 50 tahun 2017 (yang kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 112 tahun 2022) maka diharapkan harga yang ditawarkan (termasuk untuk off-grid) berada di bawah biaya produksi listrik rata-rata PLN. Akan tetapi, area ini masih menjadi abu-abu karena regulasi ini umumnya mengatur listrik on-grid. Walau model bisnis Micro-IPP dan KSO diperuntukan untuk model bisnis off-grid, pelaksanaan adanya regulasi tarif energi terbarukan, PLN akan mengacu pada tarif harga EBT on-grid yang diatur dalam regulasi.

Selain itu, proyek off-grid yang didanai donor dibatasi oleh tarif yang berbeda (Permen ESDM No. 12 Tahun 2018). Karena tidak adanya perencanaan elektrifikasi off-grid nasional dan KSO, banyak masyarakat pengelola aset donor menggunakan sistem iuran dalam membayar listrik. Iuran ini tidak belum memiliki landasan hukum. Untuk mengatasi batasan ini, tentu memerlukan upaya antar kementerian untuk menyediakan subsidi dan mekanisme tarif yang adil untuk memastikan keberlanjutan finansial dari sistem off-grid.

Rekomendasi tarif

Berdasarkan segi struktur tarif, forum sepakat bahwa solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan menawarkan tarif berdasarkan Levelized cost of electrical (LCoE atau biaya listrik rata-rata) melalui tender yang kompetitif. Tender kompetitif secara inheren bersifat terbuka terhadap berbagai jenis teknologi. Hal ini adalah perbedaan dengan tender di Indonesia saat ini yang memberlakukan persyaratan teknologi spesifik. Di bawah sistem ini, solusi dengan biaya terendah akan dimenangkan. Tentu ini berbeda dengan tarif saat ini yang diatur menurut Permen ESDM 12 tahun 2017, di mana tarif dibatasi di bawah biaya produksi rata-rata PLN. Selain itu, forum mengusulkan regulasi tarif off-grid yang terpisah dari kebijakan on-grid yang ada, baik melalui peraturan presiden yang akan datang atau peraturan baru KESDM.

Isu Komersial 1: Mekanisme subsidi

Dalam diskusi, diusulkan mekanisme subsidi baru. Setiap rumah tangga yang disubsidi akan didaftarkan oleh KESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan persyaratan tertentu. Pelanggan akan ditawarkan sejumlah listrik gratis setiap bulan (dengan kuota tertentu). Apabila ada kelebihan konsumsi dari pelanggan, maka kelebihannya harus dibayar dengan tarif yang disepakati antara pemilik proyek dan KESDM. Secara total, subsidi listrik yang dibutuhkan akan sama dengan kuota listrik bersubsidi per rumah tangga dikalikan total rumah tangga yang memenuhi syarat. Lelang subsidi yang dilaksanakan pemerintah diawali dengan kesepakatan antar konsumen dan pemerintah dimana, konsumen bersedia membayar listrik apabila konsumen menggunakannya lebih dari kuota

yang diberikan pemerintah. Dalam forum tersebut, perwakilan Kemenkeu terbuka terhadap mekanisme tersebut. Mereka meminta KESDM untuk menghitung total perkiraan alokasi dana untuk semua lokasi potensial yang akan dikucurkan dari APBN. Risiko tertinggi dari mekanisme ini adalah persetujuan DPR untuk memasukkannya ke dalam APBN.

Isu Komersial 2: Pembiayaan

Di saat bank swasta dan lokal sangat terbatas dalam mendukung proyek off-grid, forum mencari alternatif seperti penugasan langsung ke perusahaan sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan). Partisipasi perusahaan dalam proyek off-grid akan mengurangi risiko pemerintah terhadap elektrifikasi pedesaan. Untuk memungkinkan perubahan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kerangka peraturan baru.

Pilihan lainnya adalah melakukan kluster tender, memungkinkan pengembang swasta untuk mengusulkan dengan biaya pembangkitan yang lebih rendah dengan menggabungkan proyek dan meminimalisir biaya logistik dan pengadaan.

Pembaruan Data Potensi Energi Terbarukan

Pembaruan peta potensi energi terbarukan dan elektrifikasi akan memberikan penilaian lebih baik pada pilihan teknologi yang dapat digunakan. Pemerintah didorong untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan menganalisis data yang tersedia untuk menentukan alternatif biaya terendah. Hal ini dapat dilakukan melalui informasi geospasial dan teknologi yang dikenal dengan geospatial least cost planning (GLCP atau perencanaan biaya termurah berbasis geospasial).

Kesimpulan

Program elektrifikasi off-grid nasional membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta hingga PLN. KESDM dapat memimpin perencanaan implementasi off-grid sementara PLN dapat menjadi pengawas yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung, memantau, mengevaluasi, dan menstandarisasi layanan yang ditawarkan oleh pemasok off-grid. Pada saat yang sama, pemerintah daerah dapat membantu proses tersebut melalui dukungan politik lokal.





GATRIK AWARD 2022



Gatrik Award merupakan salah satu upaya Ditjen Ketenagalistrikan dalam memberikan penghargaan kepada para pegawai dan unit kerja dengan kinerja terbaik. Pada Malam Pengantugrahan Gatrik Award 2022, Jumat (09/09/2022) yang diselenggarakan di Tangerang Selatan, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menyampaikan pemberian penghargaan penting dilakukan untuk memotivasi meningkatkan pencapaian target kinerja.

Gatrik Award dibagi menjadi empat kategori yakni Pegawai Teladan, Pegawai Berprestasi, Unit Pelayanan Publik Terbaik, serta Unit Kerja Terbaik.

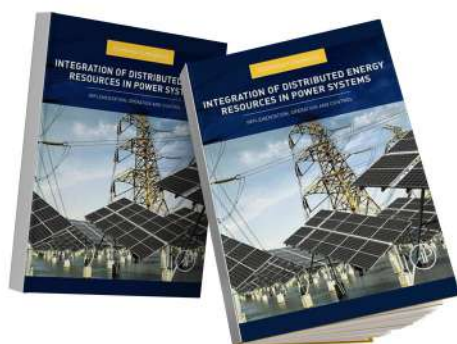




Daftar Regulasi

Koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Per Oktober Tahun 2022

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
1	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dan / atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik
3	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum	
4	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas Serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi Liquefied Natural gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik	Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG), Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik
5	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dan / atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik
6	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Pedoman Penetapan Serta Evaluasi Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri Dan Di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum	Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dan / atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik
7	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 249.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan Dan Pembangunan Insfrastruktur Liquefied Natural Gas, Serta Konversi Dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi Liquefied Natural Gas Dalam Penyediaan Tenaga Listrik	Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Insfrastruktur Liquefied Natural Gas Serta Konversi Dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi Liquefied Natural Gas Dalam Penyediaan Tenaga Listrik



Koleksi Buku

Buku berjudul *Integration of Distributed Energy Resources in Power Systems: Implementation, Operation and Control* ini mencakup pengoperasian sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta kesulitannya yang makin meningkat seiring dengan meningkatnya pangsa sumber energi terbarukan dalam bauran energi dunia. Buku ini memberikan pemahaman tentang isu-isu kunci yang diperlukan untuk pengembangan strategi tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi topik yang paling relevan dengan fokus khusus pada area transmisi dan distribusi.

SELAMAT KEPADA PARA PENERIMA PENGHARGAAN GATRIK AWARD 2022

PEGAWAI TELADAN:

NUR HIDAYANTO
PRAMUDYA
GIGIH BUDI ATMO
DIDIT WASKITO

PEGAWAI BERPRESTASI:

DINA ANDRIANI
FADOLLY ARDIN
SYARIFFUDDIN AHMAD
ANDIKA BAYU KURNIAWAN



UNIT PELAYANAN PUBLIK (UPP) TERBAIK:

PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK, POKJA PELAYANAN USAHA
KETENAGALISTRIKAN, DIREKTORAT PEMBINAAN
PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN



UNIT KERJA TERBAIK:

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI 15 PESERTA TERBAIK KOMPETISI
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
TAHUN 2022 OLEH KEMENTERIAN PAN-RB





Kerja Cepat, Kerja Cermat, Kerja Produktif

 gatrik.esdm.go.id /  Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan /   @infogatrik /  Info Gatrik



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id